

RENJA

RENCANA KERJA

2023

DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinkes DIY) merupakan turunan dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinkes DIY. Adapun Renstra tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2023. RKPD merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah DIY dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2023 dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan. RPJMD DIY menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD yang selanjutnya diturunkan dalam Renja OPD. Renja Dinkes DIY digunakan sebagai sinkronisasi kebijakan dan penyesuaian target pembangunan tahunan nasional dan daerah, pembangunan tahunan Daerah DIY dan kabupaten kota serta pembangunan tahunan antar daerah.

Diharapkan Renja ini dapat dimanfaatkan sebagai dokumen yang memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Kesehatan DIY untuk tahun anggaran 2022.

DAFTAR TABEL

| | |
|---|------|
| Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | 2-2 |
| Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 2-11 |
| Tabel 2-3 Capaian Kinerja 2021 | 2-17 |
| Tabel 2-4 Rumusan Indikator dan Formulasi perhitungan Pelayanan kesehatan yang Bermutu | 2-21 |
| Tabel 2-5 Target dan Realisasi Kinerja 2021 | 2-21 |
| Tabel 2-6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terdampingi Akreditasi | 2-23 |
| Tabel 2-7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pelayanan Kesehatan Jiwa Bermutu | 2-25 |
| Tabel 2-8 Target dan Realisasi Kinerja..... | 2-25 |
| Tabel 2-9 Pencapaian SPM RS Jiwa Grhasia..... | 2-25 |
| Tabel 2-10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu | 2-32 |
| Tabel 2-11 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Kesehatan Paru yang bermutu | 2-32 |
| Tabel 2-12 Standar Mutu RS Paru Respira tahun 2021 | 2-33 |
| Tabel 2-13 target dan Capaian Kinerja 2021 | 2-37 |
| Tabel 2-14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta..... | 2-38 |
| Tabel 2-15 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | 2-62 |
| Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan..... | 3-4 |
| Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta | 3-6 |
| Tabel 4-1 Program dan Kegiatan 2023..... | 4-1 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|------|
| Gambar 1.1 Pencapaian Indikator AHH | 1-3 |
| Gambar 2.1 Indikator Keluarga Sehat..... | 2-19 |
| Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan | 2-35 |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan merupakan sebuah investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan Pembangunan kesehatan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan DIY yang tercermin melalui capaian komponen pembangunan kesehatan dalam indikator Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hasil yang baik.

Derajat kesehatan sebagai indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) DIY tergantung kepada perkembangan angka kematian dan kesakitan. Dalam konteks kesehatan, kematian yang menjadi perhatian utama adalah kematian yang disebabkan oleh berbagai permasalahan kesehatan yang dalam hal ini dapat dibagi menjadi kematian umum dan kematian spesifik (kematian ibu, bayi dan balita). Kematian spesifik yang menjadi perhatian prioritas memiliki pengaruh besar terhadap umur harapan hidup dikaitkan dengan besaran yang dihasilkannya.

Angka Harapan Hidup (AHH) DIY merupakan yang terbaik secara nasional dengan capaian 74.74 tahun di tahun 2017, 74.82 tahun di tahun 2018, 74.92 di tahun 2019, 74.99 di tahun 2020 dan di tahun 2021 mencapai 75.04, hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik

Arah pembangunan kesehatan DIY telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Sedangkan secara teknis, arah pembangunan kesehatan 2023 didasarkan pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023.

Permasalahan- permasalahan pokok urusan kesehatan dalam perencanaan tahun 2023 diantaranya yakni :

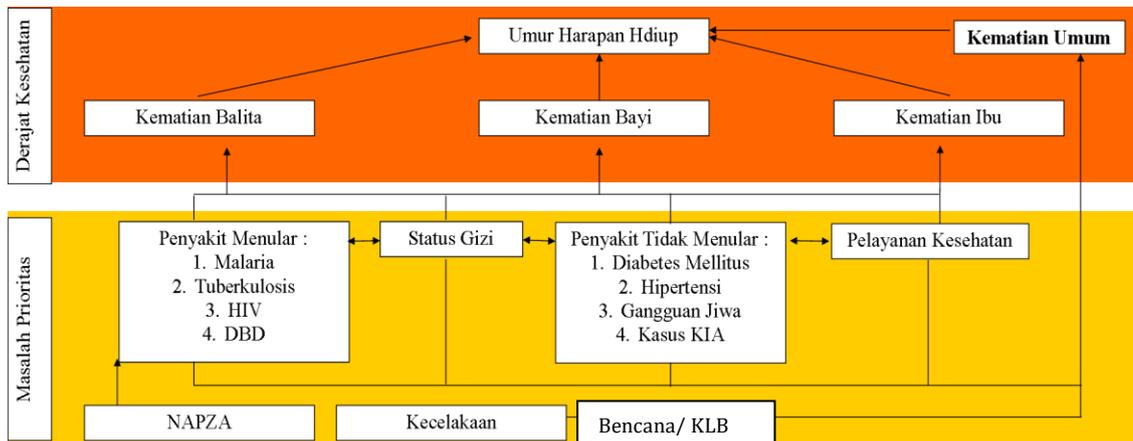
- a. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut data Riskedas 2018 capaian prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular diantaranya prevalensi Diabetes Melitus di DIY 4,5% sementara angka Nasional 2,4%, untuk Hipertensi di DIY 10,7% dan angka nasional 8,4%, terkait kasus kanker, di DIY 10,7 per mil dan Nasional 8,4 per mil. Diperlukan peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes No 4 Tahun 2019, khususnya mengenai kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB).

- c. Belum optimalnya fasilitas layanan kesehatan dalamantisipasi dan penanganan KLB dan bencana.
- d. Peningkatan kasus Covid-19 yang cukup tinggi di tahun 2021, sehingga perlu adanya penanggulangan dan pencegahan. Dinkes DIY telah melakukan berbagai upaya secara promotif, preventif, dan kuratif baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut misalnya penyelenggaraan vaksinasi, recruitment tenaga kesehatan dan relawan tenaga kesehatan maupun mahasiswa pendamping kesehatan, promosi kesehatan, dan pelaksanaan testing dan tracing covid-19. Pada tahun 2023 diperlukan kesinambungan upaya sehingga pandemi dapat ditangani dan selanjutnya terkendali dengan baik.
- e. Angka Stunting masih cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2013 untuk Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita di DIY menunjukkan angka 27,30% dan angka nasional pada 37,2%, sedangkan 2018 di DIY sebesar 21,41% dan angka nasional pada 30,8 % pada 2018 dan 37,2% pada 2013. Penurunan angka di DIY lebih kecil dibanding angka nasional (penurunan sampai 6,4%).
- f. Tingginya kasus HIV/AIDS. Kondisi ini terlihat pada penambahan jumlah kasus HIV sebesar 209 dan penderita AIDS sebesar 69 orang pada tahun 2019. Data Dinas Kesehatan DIY menunjukkan akumulasi pengidap HIV AIDS dari tahun 1993 sampai dengan 2019 sebanyak 4.990 orang, dimana 1.716 orang diantaranya telah positif AIDS. Faktor penyebab utama adalah penularan melalui hubungan heteroseksual.
Untuk HIV-AIDS sampai dengan tahun 2020 jumlah akumulasi kasus HIV sebanyak 5.627 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 363 kasus. Penemuan kasus baru HIV lebih banyak ditemukan pada laki-laki (69,6%) dengan kasus tertinggi pada rentang usia 25-49 tahun. Sedangkan kasus baru AIDS sebanyak 94 kasus dengan kasus terbanyak pada rentang usia 40-49 tahun. Pada tahun 2021 kasus HIV di DIY sebanyak 5.878 kasus dengan penemuan kasus pada laki-laki sebanyak 4.029 kasus dan pada perempuan sebanyak 1.849 kasus.
- g. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi. Data Riskesdas 2018 menunjukkan angka 10,36 per mil rumah tangga masih lebih tinggi dengan angka nasional sebesar 7,0 per mil.
- h. Jumlah kasus kematian ibu masih belum bisa ditekan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 36 kasus kematian ibu dengan penyebab tertinggi adalah pendarahan, pada tahun 2020 jumlah kematian bu sebesar 40 kasus, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus. Salah satu faktornya adalah kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil, serta dikarenakan adanya kematian karena Covid-19.
- i. Target cakupan imunisasi di DIY adalah 95% dan telah terpenuhi untuk wilayah DIY dimana hasil laporan menunjukkan bahwa cakupan semua imunisasi tahun 2021 sudah memenuhi target karena sudah berada di atas angka 95%.
- j. Pada tahun 2021 dari hasil PISPK didapatkan beberapa data diantaranya keluarga mengikuti program KB sebesar 43.85%, Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 96.78%, Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 97.67%, Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 90.35%, Pertumbuhan Balita dipantau 94.15%, Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 32.46%, Penderita hipertensi yang

berobat teratur 23.83%, Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 27.55%, Anggota keluarga tidak ada yang merokok 56.95%, Keluarga sudah menjadi anggota JKN 74.9%, Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 94.03%, dan Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga 96.83%.

Parameter sasaran kesehatan harus terus diusahakan untuk diperbaiki seperti angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penyiapan penanganan bencana.

Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan dalam kesehatan di DIY yakni kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu ditingkatkan, Edukasi makanan sehat untuk keluarga dan siswa, belum terpadu antar stakeholder, perlunya pendampingan keluarga sehat, dan kondisi rumah sakit dan puskesmas yang belum ramah terhadap lansia, anak-anak serta difabel/ penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.



Gambar 1.1 Pencapaian Indikator AHH

Deskripsi situasi pencapaian indikator kesehatan yang dijabarkan dalam Gambar Pencapaian Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017, tercatat angka harapan hidup di DIY adalah 74,74 tahun, melampaui angka harapan hidup pada tahun 2016 sebesar 74,71 tahun. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018 AHH di DIY adalah 74,82 sedangkan di tahun 2019 mencapai 74,92, di tahun 2020 mencapai 74,99 dan data terakhir di tahun 2021 mencapai 75,04. Kematian dipengaruhi oleh keberadaan penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular termasuk kecelakaan serta perilaku berbahaya seperti konsumsi narkoba. Selain itu ditahun 2020-2021 kematian juga dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19.

Pelayanan kesehatan sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan, tersusun oleh beberapa program yang pada prinsipnya merupakan penggambaran dari upaya pelayanan komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif). Upaya tersebut khususnya diberikan penekanan kepada upaya penanganan permasalahan pokok tanpa mengabaikan upaya-upaya lainnya. Permasalahan

pokok dimaksud adalah kesehatan ibu, bayi, anak, penyakit tidak menular dan menular, gizi, kejadian luar biasa, kondisi kedaruratan dan bencana, perilaku sehat dan lingkungan sehat.

Upaya memberikan pelayanan yang optimal perlu didukung oleh penyediaan sumberdaya memadai yang terdiri sarana prasarana, sediaan farmasi, dan pembiayaan kesehatan yang memadai khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Keseluruhan upaya pelayanan dan penyediaan pelayanan perlu dikelola dan didukung kebijakan, manajemen dan administrasi yang memadai pula. Guna menyelaraskan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD), khususnya untuk tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan DIY khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya untuk periode 1 tahun. Dokumen Renja Dinas Kesehatan DIY memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan kelompok indikator kinerja beserta rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar hukum yang mendasari penyusunan renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 1.2.5. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- 1.2.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 1.2.13. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 1.2.14. Kepmendagri No 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
- 1.2.1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY
- 1.2.2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009

- 1.2.3. tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY 2005-2025
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dokumen resmi yang memuat program dan kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2023. Renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 ini adalah sebagai terjemahan dari Renstra Dinas Kesehatan DIY 2023-2026, yang selanjutnya disusun tahunan, khususnya untuk periode tahun 2023. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan 2023 juga menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 ini adalah agar perencanaan pembangunan kesehatan di DIY tahun 2023, lebih terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2021.

Keberhasilan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2021 dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan DIY 2017 – 2022. Renstra Dinas Kesehatan DIY merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan DIY dengan berbasiskan data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Dari keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis yang memuat visi dan misi Gubernur DIY, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD atau Renja OPD seperti saat ini melalui penyusunan Renja 2023. Namun demikian, Renstra telah mengalami perubahan dengan mengakomodasi pada perubahan organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator keberhasilan Dinkes DIY dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 berikut:

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Lembar :

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | Urusan Wajib | | | | | | | | | |
| | Bidang Urusan Kesehatan | | | | | | | | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indikator 1: Persentase Balita Sehat | 41.22% | 40,62% | 30.28% | 39.8 | 133.69 | 41.22% | n/a | n/a |
| | | Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri | 58.21% | 76,7% | 54.66% | 79.27 | 104.03 | 58.21% | n/a | n/a |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Penurunan Persentase Balita Kurus | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 4.51 | 2.255% | 0.4% | n/a | n/a |
| | | Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK) | 1% | 0.28% | 0.5% | 12.16 | 2.432% | 1% | n/a | n/a |
| | | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4) | 77% | 77.52 | 75% | 97.67 | 130.22 % | 77% | n/a | n/a |
| | | Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) | 89% | 87.46% | 88% | 91.3% | 103.75% | 89% | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | | |
|------|---|---|---|---|--|--|-----------------------|---|--|--|-----|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| | | Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM | 22.8 | 47,94 | 22.8 | 53.4% | 234.21% | 22.8 | n/a | n/a | |
| | | Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat | 96 | 93,4 | 94% | 92.5% | 98.4% | 96 | n/a | n/a | |
| | | Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri | 51.14 | 54.66 | 50.46% | 68.7 | 136.14% | 51.14 | n/a | n/a | |
| | | Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas | 100 | 85,95 | 80.17 | 88.43 | 110.3% | 100 | n/a | n/a | |
| | | persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a | n/a | |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84 | 59.12% | 61.26% | 61.78 | 100.85 | 62.84 | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I | 95 | 93.2% | 92.05% | 103.6 | 12.54% | 95 | n/a | n/a |
| | | Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100 | n/a | n/a |
| | | Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit klinis | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | 100% | <1 per 100.000 | n/a | n/a |
| | | Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60% | 100 | 100 | 80% | 80% | 100% | 100 | n/a | n/a |
| | | Persentase Cakupan penemuan TB | 40 | 100 | 38% | 44.54% | 117.2% | 40 | n/a | n/a |
| | | persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV | 72 | 128.53 | 70% | 98.38 | 140.54 % | 72 | n/a | n/a |
| | | Annual Parasite Incidence | < 1 Permil | < 1 permil | < 1 permil | < 1 permil | 10% | < 1 Permil | n/a | n/a |
| | | persentase PJPD ditemukan | 17.5% | 12.5 | 15% | | | 17.5% | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | persentase kasus jiwa ditemukan | 17.5% | 12.5 | 15% | 50% | 333.33 | 17.5% | n/a | n/a |
| | | persentase DM ditemukan | 17.5% | 12.5 | 15% | 59% | 393.33 | 17.5% | n/a | n/a |
| | | Persentase Kanker ditemukan | 100 | 4 | 5% | 3% | 60 | 100 | n/a | n/a |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan | 54.85 | 44,47 | 45.2% | 46.05 | 100.5 | 54.85 | n/a | n/a |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan | 245/243 | 197/262 | 234/232 | 234/232 | 100 | 245/243 | n/a | n/a |
| | | FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu. | 237 | 172 | 204 | 204 | 100 | 237 | n/a | n/a |
| | | persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a | n/a |
| | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar | 80.19 | 62.32 | 71.98 | 74.64 | 103.7 | 80.19 | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | dibagi jumlah Fasyankes dikali 100 | | | | | | | | |
| | Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM tingkat daerah provinsi | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana | 85.71 | 84.36 | 84.69 | 84.69 | 100 | 85.71 | n/a | n/a |
| | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai Standar | 86.48 | 73.57 | 76.19 | 76.19 | 100 | 86.48 | n/a | n/a |
| | 1.Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, sediaan farmasi dan Perbekes serta pengendalian makanan 2.kegiatan Penerbitan izin usaha kecil tradisional(UKOT) | 1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian | 287 | 256 | 275 | 255 | 92.72% | 287 | n/a | n/a |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat | 75 | 60 | 70 | 60 | 85.71% | 75 | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | 3 . Ketersediaan Obat | 137 | 135 | 137 | 135 | 98.54 | 137 | n/a | n/a |
| | | Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan Masyarakat | 15 | 13 | 14 | 14 | 100 | 15 | n/a | n/a |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Indikator : Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | n/a | n/a |
| | Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan | Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya | 68 | 87,8 | 66 | 84.5 | 121.32 | 68 | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM tingkat daerah provinsi | Jumlah pelatihan yang dievaluasi | 6 | 4 | 5 | 5 | 100 | 6 | n/a | n/a |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indikator 1: Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a | n/a |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan | 26 | 25 | 26 | 26 | 100 | 26 | n/a | n/a |
| | | Indikator : persentase jenis layanan jamkesos yang diakses Masyarakat | 100 | 92.31 | 96.15 | 96.15 | 100 | 100 | n/a | n/a |
| | | Cakupan Jamkes Penyangga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a | n/a |
| | | Cakupan Jamkes Preventif | 12 | 8 | 10 | 10 | 100 | 12 | n/a | n/a |
| | | Cakupan Jamkes Rehabilitatif | 25 | 15 | 20 | 20 | 100 | 25 | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indikator 1: Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living) | 90% | 88 | 89 | 96.3 | 108.2 | 90% | n/a | n/a |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi | 1% | 3 | 2 | 0 | 200 | 1% | n/a | n/a |
| | | Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi \leq 30 menit | 90% | 86 | 88 | 88 | 100 | 90% | n/a | n/a |
| | | Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun | 80 | 75 | 78 | 25 | 32.05 | 80 | n/a | n/a |
| | | Waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan jiwa \leq 60 menit | 75 | 69 | 72 | 97.28 | 135.11 | 75 | n/a | n/a |
| | | Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/ Bed Occupancy Rate (BOR) | 65% | 62 | 64 | 34.5 | 53.91 | 65% | n/a | n/a |
| | | Penyelesaian Berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan | 80% | 78 | 79 | 79 | 100 | 80% | n/a | n/a |
| | | Penyusunan laporan tahunan rumah sakit | 85% | 83 | 84 | 84 | 100 | 85% | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Analisis Beban Kerja | 90% | 88 | 89 | 87 | 97.75 | 90% | n/a | n/a |
| | | Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit | 100% | 90 | 95 | 95 | 100 | 100% | n/a | n/a |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Indikator: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kesehatan lainnya serta pelayanan pendidikan melalui sub kegiatan sbb: 1. Pelayanan Keperawatan 2. Pelayanan Penunjang 3. Pelayanan Medis 4. Pelayanan Sekretariat 5. Pelayanan Pendidikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a | n/a |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Indikator 1: Angka Keberhasilan Pengobatan (success rate) TB | 86% | 84 | 85% | 86.2 | 101.41 | 86% | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | Indikator 2: Angka kematian pasien \geq 48 Jam | 1% | 1.5 | 1% | 2.49 | -49 | 1% | n/a | n/a |
| | | Indikator 3: Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari | 80 orang | 80 | 80 org | 84.84 | 106.05 | 80 orang | n/a | n/a |
| | | Indikator 4: Bed occupancy Rate (BOR) | 60% | 60 | 60% | 22.43 | 37.38 | 60% | n/a | n/a |
| | | Indikator 5: Lenght of Stay (LOS) | 5% | 5 | 5 hari | 3.93 | 121.4 | 5% | n/a | n/a |
| | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Terselenggaranya pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai dengan tata laksana (100%) untuk mendukung k keberhasilan pengobatan pasien (81,1%) | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | n/a | n/a |
| | SPM | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a | n/a |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / kegiatan (<i>output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 | |
|------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja perangkat Daerah tahun 2021 | Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a | n/a |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan DIY sesuai Bab III Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- f. pengelolaan sumber daya kesehatan;
- g. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan DIY memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 87 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan. UPT tersebut adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Paru Respira, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Pelatihan Kesehatan, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial.

Analisis kinerja pelayanan Dinkes DIY dapat dilihat di tabel 2.2. berikut:

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi |
|----|--|------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| | Indikator 1: Persentase Balita Sehat | | | 38.94% | 39.48% | 40.06% | 40.64% | 41.22% | 38.94% | 40.75% | 40,62% | 39.8% | 41.22% |
| | Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri | | | 25.91% | 52.83% | 54.66% | 56.43% | 58.21% | 25.91% | 68.6% | 76,7% | 79.27% | 58.21% |
| | Penurunan Persentase Balita Kurus | | | 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.05% | 0.1% | 0.3% | 4.51% | 0.4% |
| | Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK) | | | 0.125 | 0.25% | 0.5% | 0.75% | 1% | 0.125 | 0.25 | 0.28% | 12.6 | 1% |
| | Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4) | | | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% | 73% | 74% | 77.52 | 97.67 | 77% |
| | Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) | | | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 85% | 86% | 87.46% | 91.3 | 89% |
| | Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM | | | 9.1% | 13.7% | 18.3% | 22.8% | 22.8% | 9.1% | 13.7% | 47,94 | 53.4% | 22.8% |
| | Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat | | | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 92.2% | 90% | 93,4 | 92.5% | 96% |
| | Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri | | | 48.17% | 48.86% | 49.77% | 50.46% | 51.14% | 50% | 48.86% | 54.66 | 68.7 | 51.14% |
| | Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas | | | 9.92 | 29.75 | 60.33 | 80.17 | 100 | 9.92% | 29.75% | 85,95 | 88.43 | 100 |
| | persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD | | | 9.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9.92 | 100 | 100 | 100 | 100 |

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2023

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi |
|----|---|------------------------|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| | Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | 53.58% | 56.33% | 58.92% | 61.26% | 62.84% | 53.58% | 70.43% | 59.12 | 61.78% | 62.84% |
| | Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I | | | 89.3% | 90.65% | 92.05% | 92.05% | 93.4% | 89.3% | 90.65% | 93.2 | 103.6 | 93.4% |
| | Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit Klinis | | | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 | <1 per 100.000 |
| | Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60% | | | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 20% | 40% | 80% | 80% | 100% |
| | Persentase Cakupan penemuan TB | | | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 36% | 34% | 36% | 44.54% | 40% |
| | persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV | | | 64% | 66% | 68% | 70% | 72% | 64% | 66% | 87.4 | 98.38 | 72% |
| | Annual Parasite Incidence | | | < 1 permil | < 1 Permil | < 1 permil | < 1 permil | < 1 Permil | < 1 permil | < 1 Permil | < 1 permil | < 1 permil | < 1 permil |
| | persentase PJPD ditemukan | | | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% |
| | persentase kasus jiwa diketemukan | | | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 50% | 17.5% |
| | persentase DM diketemukan | | | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 59% | 17.5% |
| | Persentase Kanker diketemukan | | | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 5% |
| | Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan | | | 38.37% | 41.08% | 48.08% | 52.37% | 54.85% | 38.37% | 44.02% | 44.47% | 46.05 | 54.85% |

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2023

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi |
|----|--|------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| | FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan | | | 75/170 | 141/182 | 192/213 | 234/232 | 245/243 | 75/170 | 182/262 | 197/262 | 234/232 | 245/243 |
| | FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu. | | | 120 | 172 | 204 | 236 | 237 | 120 | 120 | 8 | 236 | 237 |
| | persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar dibagi jumlah Fasyankes dikali 100 | | | 40.58 | 50.24 | 62.32 | 71.98 | 80.19 | 40.58 | 51.2 | 62.32 | 74.64 | 80.19 |
| | Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar | | | 66.92 | 72.05 | 76.79 | 81.07 | 86.48 | 66.92 | 73.14 | 73.57 | 76.19 | 86.48 |
| | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana | | | 70.92 | 82.65 | 83.67 | 84.69 | 85.71 | 70.92 | 82.65 | 84.36 | | 85.71 |
| | 1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian | | | 215 | 236 | 256 | 275 | 287 | 215 | 236 | 256 | 255 | 287 |
| | 2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat | | | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 |
| | 3 . Ketersediaan Obat | | | 130 | 133 | 135 | 137 | 137 | 130 | 133 | 135 | 135 | 137 |
| | Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan masyarakat | | | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| | Indikator : Jumlah layanan pengembangan laboratorium | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2023

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi |
|----|--|------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| | untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya | | | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 60 | 78.46 | 87.8 | 84.5 | 68 |
| | Jumlah pelatihan yang dievaluasi | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Indikator 1: Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan | | | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 |
| | Indikator : persentase jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat | | | 76.92 | 84.62 | 92.31 | 96.15 | 100 | 76.92 | 84.62 | 92.31 | 96.15 | 100 |
| | Cakupan Jamkes Penyangga | | | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| | Cakupan Jamkes Preventif | | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| | Cakupan Jamkes Rehabilitatif | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | Indikator 1: Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living) | | | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91.46 | 97.38 | 88 | 96.3 | 90 |
| | Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi | | | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| | Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi ≤ 30 menit | | | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 81.97 | 83.55 | 86 | 88 | 90 |
| | Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun | | | 70 | 72 | 75 | 78 | 89 | 102 | 79.88 | 75 | 25 | 89 |

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2023

| No | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi |
|----|--|------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| | Waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan jiwa ≤ 60 menit | | | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 42 | 64.66 | 69 | 97.28 | 75 |
| | Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/ Bed Occupancy Rate (BOR) | | | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 49.29 | 48.74 | 62 | 34.5 | 65 |
| | Penyelesaian Berkas pengajuan klain pasien jaminan kesehatan | | | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | Penyusunan laporan tahunan rumah sakit | | | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 83 | 84 | 85 |
| | Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Analisis Beban Kerja | | | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 80.3 | 85.88 | 88 | 87 | 90 |
| | Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit | | | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| | Indikator: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kesehatan lainnya serta pelayanan pendidikan melalui sub kegiatan sbb : 1. Pelayanan Keperawatan 2. Pelayanan Penunjang 3. Pelayanan Medis 4. Pelayanan Sekretariat 5. Pelayanan Pendidikan | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indikator 1: Angka Keberhasilan Pengobatan (success rate) TB | | | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 82% | 84.87% | 84.87% | 86.2 | 86% |
| | Indikator 2: Angka kematian pasien > 48 jam | | | 2.5% | 2% | 1.5% | 1% | 1% | 0.7% | 0.76% | 1.5 | 2.49% | 1% |

Hasil evaluasi 2021 terhadap sasaran strategis, didapatkan bahwa semua sasaran strategis Dinas Kesehatan DIY tercapai, bahkan dua diantaranya pencapaiannya melampaui 100%. Secara detail, capaian indikator Dinas Kesehatan DIY 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-3. Capaian Kinerja Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
|----|---|---|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Terwujudnya perilaku sadar sehat | 1 Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu | 2 Persentase Pelayanan kesehatan yang terakreditasi | % | 70,99 | 75.19 | 105,92 |
| 3 | Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu | 3 Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa | % | 70 | 81.39 | 116.27 |
| 4 | Terwujudnya pelayanan kesehatan Paru yang bermutu | 4 Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan* | % | 78.9 | 78.9 | 100 |

Catatan: * Kesehatan Paru

1. Terwujudnya Perilaku Sadar Sehat

Kinerja sasaran Perilaku Sadar Sehat diukur dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga. Sumber data diolah dari hasil evaluasi puskesmas yang mengimplementasikan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) dibagi jumlah seluruh Puskesmas di DIY.

Sasaran terwujudnya Perilaku Sadar Sehat didukung oleh dua program yakni program kesehatan masyarakat serta program pencegahan dan pengendalian penyakit. Hasil pendataan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga akan dipakai sebagai intervensi sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu berbagai upaya penurunan angka penyakit terus dilakukan.

Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Indikator ini juga mengakomodasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Program ini bertujuan meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;

- b. penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*);
- c. penanggulangan penyakit menular; dan
- d. penanggulangan penyakit tidak menular.

Selain itu, pemilihan indikator ini juga mengacu pada kebijakan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari Tahun 2021-2025 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 103 Tahun 2021. Yogyakarta Sehat Lestari adalah kondisi kesehatan yang dicita-citakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana perilaku sehat, peri kehidupan sehat, penerapan norma dan nilai hidup sehat, akan menjadi budaya yang melekat di dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Puskesmas adalah elemen utama. Tujuan PISPK adalah memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan:

- a. melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
- c. menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;
- d. melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
- f. melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

Tujuan akhir target puskesmas yang melaksanakan PIS PK adalah tercapainya Indikator Keluarga Sehat (IKS). Parameter keluarga dianggap sehat jika terpenuhi:

1. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil pendataan PISPK diinput langsung dalam aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan melalui <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>. Namun hasil pendataan belum semua dapat dikembalikan kepada daerah untuk dapat dimanfaatkan. Masih ada data yang diproteksi oleh Kementerian Kesehatan sehingga hasilnya belum diketahui. Berikut adalah hasil yang sudah dapat diakses oleh puskesmas di wilayah DIY:

| NO | INDIKATOR | % CAKUPAN DIY |
|----|--|------------------|
| 1 | Keluarga mengikuti program KB | 39.62 |
| 2 | Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan | 96.59 |
| 3 | Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap | 97.52 |
| 4 | Bayi mendapatkan ASI Eksklusif | 90.26 |
| 5 | Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar | 30.72 |
| 6 | Penderita hipertensi yang berobat teratur | 20.5 |
| 7 | Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan | 31.56 |
| 8 | Keluarga sudah menjadi anggota JKN | 74.42 |
| 9 | Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih | 93.89 |
| 10 | Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga | 96.79 |

Sumber <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>

Gambar 2.1. Indikator Keluarga Sehat

Beberapa catatan terkait data diatas adalah sebagai berikut:

- Untuk TB, masih ada yang melewatkan prosedur pemeriksaan yang seharusnya sehingga ada yang tidak terkonfirmasi pemeriksaan bakteriologi sebelumnya.
- Hipertensi umumnya masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan bukan penyakit yang mengancam. Sehingga banyak penderita yang enggan melakukan pengobatan secara teratur.
- Hal yang sama juga terjadi pada penderita gangguan jiwa. Pengobatan baru dilakukan ketika dirasakan mengancam keselamatan anggota keluarga lain atau mengganggu lingkungan sekitar.
- Terkait indikator tentang merokok, angka merokok masih tinggi. Namun kesadaran untuk tidak merokok didalam rumah mulai nampak.
- Indikator yang terkait JKN, KB dan Kesehatan Lingkungan

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Pada grafik ini terlihat bahwa sebagian masyarakat sudah menjadi anggota JKN. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang enggan mendaftar secara mandiri. Disisi lain untuk PBI masih ada persoalan pada pendataan. Ada masyarakat miskin namun tidak terdaftar sebagai PBI dan sebaliknya ada masyarakat yang secara ekonomi mampu mendaftar secara mandiri namun malah masuk sebagai PBI. Pada proses transisi ini, DIY masih menyediakan pembiayaan melalui Bapel Jamkessos untuk masyarakat miskin yang tidak dibiayai oleh BPJS dan juga kasus kasus khusus sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2017. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di DIY dengan penerapan fungsi pendampingan melalui program Jamkes Penyangga dan pengembangan komplemen JKN dengan Jamkes Preventif dan Rehabilitatif.

- Di DIY sebagian besar keluarga telah memiliki akses penggunaan sarana air bersih. Di beberapa tempat masih ada masyarakat yang belum memiliki akses terkait faktor geografi (Di wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan juga kondisi ekonomi yang tidak mampu membeli air bersih. Untuk Jamban sehat, di beberapa lokasi masyarakat masih memakai jamban yang dikategorikan sebagai jamban sehat semi permanen dan juga jamban *sharing*. Ini juga berhubungan dengan faktor ekonomi dan faktor geografis yang sulit mengakses air bersih.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung percepatan pelaksanaan PISPK oleh puskesmas. Dukungan dana ini memacu persiapan untuk pelaksanaan PISPK menjadi jauh lebih cepat.
2. Pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PISPK serta mengkomunikasikan persoalan teknis ke pusat.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan tenaga enumerator dalam pelaksanaan pendataan PISPK dengan cakupan penduduk di DIY. Tenaga di Puskesmas tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus didata.
2. Responden kurang kooperatif dengan menyembunyikan fakta fakta masalah kesehatan yang dialami dan sebagian sulit ditemui. Ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah rasa malu, melihat itu sebagai hal pribadi dan rahasia dan juga karena kesibukan
3. Data yang sudah dientry melalui aplikasi kepusat (Kementerian Kesehatan) tidak bisa sepenuhnya kembali ke puskesmas karena proteksi data oleh Kementerian Kesehatan.
4. Intervensi terkait temuan temuan yang didapatkan dilapangan

Strategi untuk pencapaian Target Berikutnya:

1. Peningkatan Kompetensi tenaga surveyor terutama kemampuan menggali data, memverifikasi dan melakukan observasi.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan komprehensif
3. Bersama –sama lintas program untuk meningkatkan intervensi lanjutan , dan segera melakukan entry kembali pada perubahan sesuai indikator KS, sehingga dapat merubah Indeks Kesehatan Keluarga (IKS) wilayah

2. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran **Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu** diukur dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase Pelayanan Kesehatan yang Bermutu. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu | Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang sudah terakreditasi dibagi seluruh FKTP/FKTL dan Fasilitas Kesehatan Lain dikali 100 |

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan indikator Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| No | Indikator Sasaran | Baseline 2020 | 2021 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%) Target |
|----|---|---------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi | 75,19 | 70,99 | 75,19 | 105,92 | 67,18 | |

Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan No 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu.

Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan puskesmas dilakukan dengan akreditasi. Dengan implementasi standar akreditasi akan menjamin manajemen puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis telah dilakukan secara berkesinambungan. Indikator ini dipilih karena akreditasi menjadi bagian dari sebuah penjaminan mutu pelayanan di sektor kesehatan. Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan telah melaksanakan pendampingan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung proses akreditasi. Juga dukungan melalui workshop, pertemuan koordinasi, sosialisasi instrumen untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya proses akreditasi untuk dilakukan.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Peraturan tentang akreditasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Bahwa Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.

Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan telah melaksanakan pendampingan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung proses akreditasi. Juga dukungan melalui workshop, pertemuan koordinasi, sosialisasi instrumen untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya proses akreditasi untuk dilakukan.

Tabel 2.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terdampingi Akreditasi

| Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | Jumlah FKTP/FKTL | Jumlah FKTP/FKTL Yang Terdampingi Akreditasi |
|--|------------------|--|
| Puskesmas | 121 | 121 |
| RS | 78 | 68 |

Sumber : Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Regulasi PMK Nomor 99 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 41 ayat (1) dan (2) pada tahun 2020, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi.
2. Regulasi Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. Regulasi tersebut diikuti dengan pembuatan petunjuk teknis akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi, pelatihan pendampingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pelatihan akreditasi puskesmas, bimbingan teknis dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan DIY dan kabupaten/kota.
3. Peran serta surveyor lokal dengan memberikan asistensi bagi puskesmas yang membutuhkan pendampingan
4. Sosialisasi, bimbingan teknis akreditasi oleh Dinas Kesehatan DIY Provinsi dan Kabupaten/Kota, penguatan komitmen seluruh tenaga Puskesmas , pemenuhan anggaran pendampingan dan akreditasi Puskesmas yang berasal dari DAK non fisik serta validasi data sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sebelum di *entry* ke dalam aplikasi ASPAK.
5. Ketersediaan SDM Kefarmasian dan kepatuhan dalam mengimplementasikan standar dan pedoman. sarana telah memenuhi standar sarpras, perijinan, SDMk melalui upaya koordinasi dengan BKD provinsi dan kabupaten/kota untuk pemenuhan SDMk sesuai perencanaan kebutuhan, bimtek terpadu RS, bimtek dengan penekanan pada faskes yang dibawah standar, koordinasi dengan kabupaten/kota dengan gerai terpadu perijinan
6. Dukungan regulasi Permenkes nomor 33 tahun 2015 tentang Analisis Beban Kerja, Permenkes nomor 75 tentang Puskesmas, Permenkes tentang 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perijinan RS, dan permenkes nomor 9 tahun 2014 tentang klinik.
7. Balai Laboratorium Kesehatan terus mengembangkan pelayanan yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium.
8. Bapelkes mengembangkan Pelatihan yang dievaluasi sehingga semua mantan linatih harus menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat saat pelatihan di instansinya masing masing

9. Jumlah masyarakat miskin terbiayai jaminan kesehatan sesuai dengan kriteria sebesar 100%.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Masalah Ketenagaan masih menjadi masalah mendasar terutama bagi RS dalam melaksanakan akreditasi.
2. Mekanisme monitoring paska akreditasi belum berjalan optimal.
3. Tenaga Kesehatan yang mampu memenuhi syarat sebagaimana diminta dalam akreditasi masih terbatas. Ini berhubungan dengan Kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang juga memiliki kapasitas terbatas
4. Ijin pengelolaan limbah medis juga menjadi kendala bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan akreditasi
5. Data kepesertaan Jaminan Kesehatan dan kebijakannya

Strategi untuk pencapaian Target Berikutnya:

1. Pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk mempertahankan penerapan standar mutu pelayanan, serta pembinaan lanjut bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum memenuhi standar mutu;
2. Mendorong RS untuk mampu melaksanakan rekrutmen tenaga yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kapasitas pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan
4. Membuat komitmen dan kerjasama dengan instansi terkait perijinan limbah
5. Melakukan Advokasi dengan BPJS

Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan Rumah Tangga, ditetapkan sebagai salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan DIY disamping indikator pelayanan kesehatan yang bermutu. Indikator PHBS merupakan indikator komposit yang terdiri dari 10 indikator mencakup gambaran kesehatan individu dan rumah tangga, yaitu

- 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- 2) Memberi bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- 3) Menimbang Balita setiap bulan
- 4) Menggunakan air bersih
- 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- 6) Menggunakan jamban sehat
- 7) Memberantas jentik dirumah seminggu sekali
- 8) Makan sayur dan buah setiap hari
- 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari
- 10) Tidak merokok di dalam rumah

3. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa Hasil Jumlah indikator mutu yang dicapai sebagai berikut:

Tabel 2-7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu | Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa | Jumlah indikator mutu yang dicapai dibagi jumlah seluruh indikator mutu dikali 100% |

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu dengan indikator Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-8 Target dan Realisasi Kinerja

| No | Indikator Sasaran | Baseline 2020 | 2021 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%) |
|----|--|---------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa | 65 | 70 | 81,39 | 116,27 | 75 | 108,52 |

Analisis Ketercapaian Kinerja:

1. Persentase realisasi terhadap target tercapai 116,27 %
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 3,49%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Jiwa Grhasia sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

Capaian kinerja dapat kita lihat pada tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) RS Jiwa Grhasia DIY. Sehubungan dengan masih berprosesnya usulan rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Grhasia yang baru, maka untuk tahun 2021 Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Grhasia masih menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009. Pencapaian SPM telah dapat dicapai di 2020 dan yang di tahun kemarin belum tercapai dan dievaluasi sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-9 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Jiwa Grhasia Tahun 2021

| SPM | | TARGET | CAPAIAN | KETERANGAN |
|-------------------------|--|---|---|----------------|
| KEGAWATDARURATAN | | | | |
| 1 | Jam buka pelayanan gawat darurat | 24 jam | 24 jam | Tercapai |
| 2 | Angka dokter dan perawat pemberi layanan bersertifikat ACLS/PPGD/GELS (<i>Advanced Cardiac Life Support / Pelatihan Penanganan Gawat Darurat / General Emergency Life Support</i>) | 100% | 69.27% | Tidak Tercapai |
| 3 | <i>Emergency Respon Time / ERT (IGD) ≤ 5 menit</i> | 100% | 92.12% | Tidak Tercapai |
| 4 | Kematian pasien ≤ 24 jam | ≤ 2 per 1000 (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) | 0.000083 | Tercapai |
| 5 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 83.11% | Tercapai |
| RAWAT JALAN | | | | |
| 1 | Pemberi pelayanan di poli jiwa | 100% | 100% | Tercapai |
| 2 | Ketersediaan pelayanan di RS Jiwa | a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan ansietas - depresi e. Psikosomatis f. Psikiatri anak dan remaja g. Mental retardasi h. Psikometri i. Usia lanjut | a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan ansietas - depresi e. Psikosomatis f. Psikiatri anak dan remaja g. Mental retardasi h. Psikometri i. Usia lanjut | Tercapai |
| 3 | Angka jam mulai pelayanan sesuai ketentuan (08.00) | 100% | 80.60% | Tidak tercapai |
| 4 | Waktu tunggu rawat jalan | ≤ 60 menit | 43 | Tercapai |
| 5 | Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB | ≥ 60% | 100.00% | Tercapai |
| 6 | Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit | ≥ 60% | 100.00% | Tercapai |
| 7 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 81.99% | Tercapai |
| RAWAT INAP | | | | |
| 1 | Pemberi pelayanan di rawat inap: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat minimal D3 | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 2 | Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa penanggung jawab pasien rawat inap jiwa | 100% | 100.00% | Tercapai |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|----------------|
| 3 | Kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian | 0 | 0 | Tercapai |
| 4 | Kematian pasien > 48 jam | ≤ 0,24% | 0.45% | Tidak tercapai |
| 5 | Kejadian pulang paksa | ≤ 5% | 0.64% | Tercapai |
| 6 | Ketersediaan pelayanan rawat inap di RS Jiwa | a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan neurotik | a. Gangguan mental organik b. NAPZA c. Gangguan psikotik d. Gangguan neurotik | Tercapai |
| 7 | Kejadian adanya pasien bunuh diri | 0 | 0 | Tercapai |
| 8 | Angka <i>re-admission</i> pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan | ≤10% | 0.95% | Tercapai |
| 9 | Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa | ≤ 6 minggu | 1,75 minggu | Tercapai |
| 10 | Kejadian pasien melarikan diri | 0 | 0 | Tercapai |
| 11 | Persentase pasien yang mampu ADL | 87% | 89.47% | Tercapai |
| 12 | Angka reaksi transfusi | ≤ 0,01% | 0.00% | Tercapai |
| 13 | Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB | ≥ 60% | 100.00% | Tercapai |
| 14 | Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit | ≥ 60% | 100.00% | Tercapai |
| 15 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 88.99% | Tercapai |
| RAWAT INTENSIF | | | | |
| 1 | Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam | ≤ 3% | 0.71% | Tercapai |
| 2 | Lama perawatan di IRI > 5 hari | ≤ 10% | 15.70% | Tidak tercapai |
| 3 | Penanganan pasien gaduh gelisah > 48 jam | ≤ 20% | 11.42% | Tercapai |
| 4 | Kepatuhan jam <i>visite</i> dokter spesialis | ≥ 80% | 84.73% | Tercapai |
| REHABILITASI MEDIK | | | | |
| 1 | Kejadian luka bakar pada tindakan <i>heating</i> | 0 | 0 | Tercapai |
| 2 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 84.42% | Tercapai |
| RADIOLOGI | | | | |
| 1 | Waktu tunggu hasil pemeriksaan radiologi | ≤ 3 jam | 12:29:30 AM | Tercapai |
| 2 | Pelaksanaan ekspertisi oleh Dokter Spesialis Radiologi | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 3 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 81.92% | Tercapai |
| LABORATORIUM | | | | |
| 1 | Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium | ≤140 menit | 1:31:10 AM | Tercapai |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|----------------|
| 2 | Pelaksana ekspertisi oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 3 | Kejadian kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium | 0 | 0 | Tercapai |
| 4 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 81.50% | Tercapai |
| REHABILITASI MENTAL | | | | |
| 1 | Angka ketidaksesuaian rehabilitan mendapatkan kegiatan sesuai hasil seleksi | ≤ 5% | 2.75% | Tercapai |
| 2 | Angka ketidakpatuhan rehabilitan menyelesaikan proses tahapan rehabilitasi | ≤15% | 8.50% | Tercapai |
| FARMASI | | | | |
| 1 | Waktu tunggu pelayanan obat jadi untuk pasien rawat jalan | ≤ 30 menit | 12:21:08 AM | Tercapai |
| 2 | Waktu tunggu pelayanan obat racikan untuk pasien rawat jalan | ≤ 60 menit | 12:43:36 AM | Tercapai |
| 3 | Angka kesalahan pemberian obat | 0% | 0.02% | Tidak tercapai |
| 4 | Penulisan resep sesuai formularium | 100% | 99.30% | Tidak tercapai |
| 5 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 79.21% | Tidak tercapai |
| GIZI | | | | |
| 1 | Angka keterlambatan pemberian makanan kepada pasien | ≤ 5% | 0.00% | Tercapai |
| 2 | Angka sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien | ≤ 10% | 9.38% | Tercapai |
| 3 | Kejadian kesalahan pemberian diet | 0 | 0.00% | Tercapai |
| REKAM MEDIS | | | | |
| 1 | Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan | 0% | 0.58% | Tidak tercapai |
| 2 | Angka ketidaklengkapan pengisian RM rawat inap | 0% | 19.95% | Tidak tercapai |
| 3 | Angka ketidaklengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas | 0% | 14.05% | Tidak tercapai |
| 4 | Waktu penyediaan RM pelayanan rawat jalan | ≤ 10 menit | 9:48:00 AM | Tercapai |
| 5 | Waktu penyediaan RM pelayanan rawat inap | ≤ 15 menit | 2:30:00 PM | Tercapai |
| 6 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 79.41% | Tidak tercapai |
| PENGELOLAAN LIMBAH | | | | |
| 1 | Baku mutu limbah cair | a. BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>) < | 1.49 | Tercapai |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|----------------|
| | | 30 mg/l | | |
| | | b. COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>) < 80 mg/l | 11.31 | |
| | | c. TSS (<i>Total Suspended Solid</i>) < 30 mg/l | 6.86 | |
| | | d. pH 6-9 | 7.89 | |
| 2 | Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan | 100% | 100.00% | Tercapai |
| PEMELIHARAAN SARPRAS RS | | | | |
| 1 | Kecepatan perbaikan kerusakan ringan ≤ 3 x 24 jam | 90% | 100.00% | Tercapai |
| 2 | Ketepatan waktu pemeliharaan alat medis | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 3 | Kalibrasi alat medis tepat waktu | 100% | 100.00% | Tercapai |
| ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN | | | | |
| 1 | Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 2 | Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 3 | Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 4 | <i>Cost recovery</i> | ≥ 40% | 125.29% | Tercapai |
| 5 | Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 6 | Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap ≥ 2 jam | ≤ 10% | 0.00% | Tercapai |
| 7 | Ketepatan waktu pemberian jasa layanan sesuai kesepakatan waktu | 100% | 100.00% | Tercapai |
| 8 | Kecepatan respon terhadap komplain | ≥ 75% | 100.00% | Tercapai |
| 9 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 83.23% | Tercapai |
| AMBULANS JENAZAH | | | | |
| 1 | Waktu pelayanan ambulans jenazah | 24 jam | 24 jam | Tercapai |
| 2 | Kecepatan memberikan pelayanan ambulans jenazah di rumah sakit ≤ 30 menit | 100% | 100.00% | Tercapai |
| PEMULASARAAN JENAZAH | | | | |
| 1 | Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah | ≤ 2 jam | 12:17:36 AM | Tercapai |
| PEMELIHARAAN LINEN | | | | |
| 1 | Kejadian linen yang hilang | 0 | 0.00% | Tercapai |
| 2 | Angka ketidaktepatan waktu pengembalian linen untuk instalasi rawat inap ≤ 24 jam | 0% | 5.00% | Tidak tercapai |
| PELAYANAN PASIEN PBI | | | | |
| 1 | Pelayanan terhadap pasien PBI dan pasien Dinas Sosial yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan | 100% | 99.94% | Tidak tercapai |

| DIKLATLITBANG | | | | |
|---------------|--|-------|--------|----------------|
| 1 | Angka karyawan yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam setahun | ≥ 60% | 16.20% | Tidak tercapai |
| 2 | Kepuasan pelanggan | ≥ 80% | 82.34% | Tercapai |
| PPI | | | | |
| 1 | Komite PPI terlatih | ≥ 75% | 71.31% | Tidak tercapai |
| 2 | Angka penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) | 100% | 97.91% | Tidak tercapai |
| 3 | Angka infeksi HAIs (<i>Healthcare Associated Infections</i>) ISK di wisma rawat inap | ≤ 5% | 0.00% | Tercapai |
| 4 | Angka phlebitis | ≤ 5% | 0.00% | Tercapai |
| 5 | Angka ketidakpatuhan cuci tangan | ≤15% | 0.90% | Tercapai |

Indikator yang digunakan untuk penilaian IKU terdiri dari indikator yang ada di SPM RS Jiwa Grhasia (berdasarkan Pergub DIY no 25 tahun 2009 tentang SPM RS Jiwa Grhasia) dan indikator BLUD (berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor 36 tahun 2016 tentang indikator kinerja BLUD). Faktor pendukung tercapainya IKU RS Jiwa Grhasia adalah kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Jiwa Grhasia sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

4. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru Yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan.

Tabel 2-10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu | Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan | Jumlah indikator mutu yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh indikator mutu dikalikan 100 |

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu dengan indikator Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-11 Target dan Realisasi Kinerja

| No | Indikator Sasaran | Baseline 2020 | 2021 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%) |
|----|----------------------|---------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase Pemenuhan | 77,2 | 78,9 | 81.39 | 116.27 | 81,3 | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Standar Mutu Pelayanan | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|

Analisis Ketercapaian Kinerja:

1. Persentase realisasi terhadap target tercapai lebih dari 100%
2. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Paru Respira sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

Pemenuhan standar mutu pelayanan berdasarkan pada capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru Respira sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Paru Respira. Adapun rincian indikator mutu yang memenuhi standar sebagai berikut:

Tabel 2-12 Standar Mutu RS Paru Respira Memenuhi Standar Tahun 2021

| NO | JENIS PELAYANAN | JUMLAH INDIKATOR | MEMENUHI STANDAR | |
|----|------------------------------------|------------------|------------------|------|
| | | | Jumlah | % |
| 1 | Gawat darurat | 8 | 8 | 100 |
| 2 | Rawat Jalan | 8 | 5 | 62,5 |
| 3 | Rawat Inap | 13 | 11 | 84,6 |
| 4 | Radiologi | 7 | 7 | 100 |
| 5 | Lab.Patologi Klinik | 9 | 9 | 100 |
| 6 | Rehabilitasi Medik/Fisioterapi | 5 | 5 | 100 |
| 7 | Farmasi | 7 | 5 | 71,4 |
| 8 | Gizi | 6 | 6 | 100 |
| 9 | Rekam Medik | 8 | 6 | 75 |
| 10 | Pengelolaan Limbah | 5 | 5 | 100 |
| 11 | Administrasi dan Manajemen | 16 | 14 | 87,5 |
| 12 | Ambulans/Kereta Jenazah | 7 | 6 | 85,7 |
| 13 | Pemulasaran Jenazah | 7 | 1 | 14,2 |
| 14 | Pelayanan Pemeliharaan RS | 5 | 3 | 60 |
| 15 | Pelayanan Laundry | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Pencegahan dan Pegendalian Infeksi | 6 | 6 | 100 |
| | JUMLAH | 123 | 95 | 77,2 |

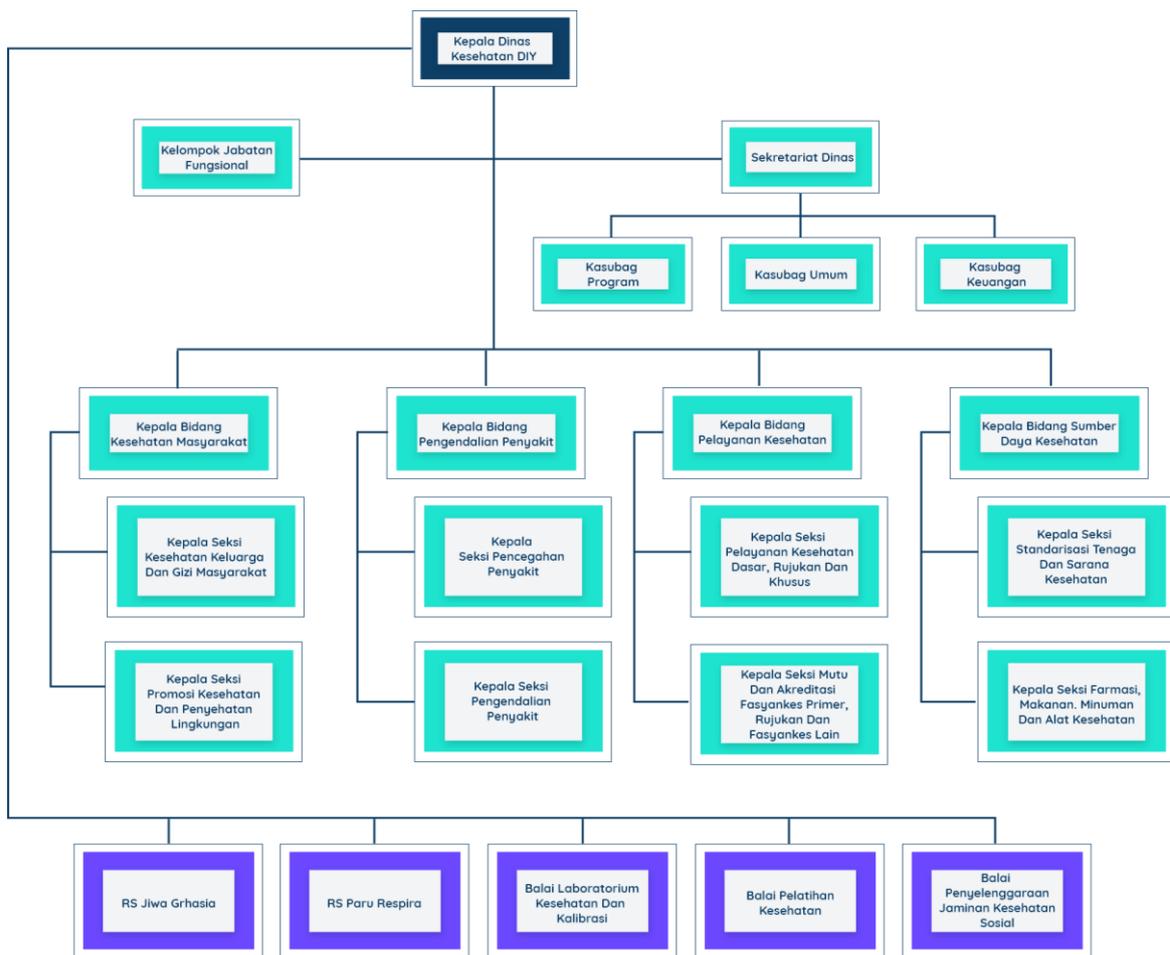
Sasaran Strategis RS Paru Respira tahun 2017-2022 adalah Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang bermutu dengan indikator Persentase pemenuhan Standar mutu Pelayanan. Faktor pendukung tercapainya adalah kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Paru Respira sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam

tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam Peningkatan Kualitas manusia Indonesia. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan



Indikator pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

Stategi Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 bidang Kesehatan:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), masih terdapat beberapa isu lingkungan yang harus mendapatkan perhatian. Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 4 isu yaitu :

1. Stunting
2. Angka Kematian Ibu dan Bayi
3. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
4. Penguatan pelayanan kesehatan, pengawasan obat dan makanan

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2009-2029 dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Bantul 2010-2030, Dinkes DIY telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan RT/RW dimaksud dalam rangka mengembangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

a. Faktor Penghambat Pelayanan

Untuk pelayanan kesehatan rujukan di RS adalah

- Rasio persebaran jumlah dan kelas rumah sakit yang belum merata terutama untuk kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo berimplikasi pada akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan rumah sakit
- Adanya kebijakan sistem regionalisasi rujukan sehingga berpengaruh pada kabupaten kota yang belum memiliki rumah sakit rujukan yang sesuai klasifikasi dan kompetensi yang diharapkan oleh masyarakat

b. Faktor Pendorong Pelayanan

- sumber daya kesehatan
- Adanya desentralisasi bidang kesehatan
- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
- Adanya pembiayaan kesehatan
- Institusi pendidikan kesehatan yang memadai
- Masyarakat yang berdaya
- Kebijakan lokal sistem rujukan berbasis kompetensi

Hasil capaian indikator Renstra Dinas Kesehatan DIY tidak lepas dari kontribusi hasil capaian Renstra Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Sebaliknya hasil tersebut juga telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Tabel 2-13. Tabel Target dan Capaian Kinerja 2021

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
|----|--|--------|--------|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Pelayanan kesehatan yang terakreditasi | % | 70.99 | 75.19 | 105.92 |
| 3 | Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa | % | 78.9 | 78.9 | 100 |
| 4 | Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan* | % | 70 | 81.39 | 116.27 |

Catatan: * Kesehatan Paru

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan Pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu-isu pokok dan atau strategis tersebut yang menjadi masalah prioritas adalah:

- Gizi dan kesehatan ibu dan anak, yang meliputi *Stunting*, WUS KEK (Wanita Usia Subur Kekurangan Energi Kronik), Kematian Ibu, dan Kematian Bayi.
- Penyakit tidak menular yang meliputi *Diabetes* Melitus, PJPD (Penjakit Jantung dan Pembuluh Darah)/Hipertensi, Gangguan Jiwa, Kanker (Ca), dan Napza.
- Penyakit menular, yang meliputi HIV AIDS, Tuberkulosis, DBD, Pneumonia termasuk penyakit potensial KLB.
- Pelayanan kesehatan, yang meliputi akreditasi dan sumber daya manusia, termasuk kesiapan dalam penanganan bencana
- Pelayanan kesehatan tradisional, yang merupakan amanah keistimewaan

Selanjutnya Dinas Kesehatan DIY memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah responsif terhadap isu-isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari langkah responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2023.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dari segi anggaran yang direncanakan, serta indikator keluaran dan hasil, masih perlu dilakukan perubahan. Perubahan rencana anggaran ini dibutuhkan karena terdapat perubahan kebutuhan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran serta kebijakan. Review ini membantu memetakan selisih antara kebutuhan dengan rancangan awal RKPD.

Tabel 2-14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|--|-------------------|--|---|-------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 56,918,259,670.00 | Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 35,875,145,416.00 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 40,931,000.00 | Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 40,931,000.00 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. Renstra 2. Renja 2023 3. ROPK 2022 4. Perubahan Renja 2022 | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 31,929,000.00 | 1. Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. Renstra 2. Renja 2023 3. ROPK 2022 4. Perubahan Renja 2022 | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 31,929,000.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | DPA perubahan Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. DPA | 1 dokumen 1 dokumen | 2,281,000.00 | DPA perubahan Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku : 1. DPA | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 2,281,000.00 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan 02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD | 1 dokumen 1 dokumen | 6,721,000.00 | 01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan 02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 6,721,000.00 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | tercapainya administrasi Keuangan Dinkes DIY | 100% | 54,548,814,005.00 | tercapainya administrasi Keuangan Dinkes DIY | 100% | 33,471,222,401.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|-------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 54,472,614,005.00 | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN | 1 tahun | 33,395,022,401.00 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Pembayaran Honor Pengelola Keuangan | 12 bulan | 70,200,000.00 | Pembayaran Honor Pengelola Keuangan | 12 bulan | 70,200,000.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Laporan Tahunan SKPD | 1 dokumen | 1,662,000.00 | Laporan Tahunan SKPD | 1 dokumen | 1,662,000.00 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Laporan Bulanan/ Fungsional Laporan Semester/Prognosis | 24 dokumen 1 dokumen | 4,338,000.00 | Laporan Bulanan/ Fungsional Laporan Semester/Prognosis | 24 dokumen 1 dokumen | 4,338,000.00 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | tercapainya pengamanan barang milik daerah | 100% | 16,400,000.00 | tercapainya pengamanan barang milik daerah | 100% | 16,400,000.00 |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Pembayaran PBB Dinkes DIY | 1 tahun | 2,000,000.00 | Pembayaran PBB Dinkes DIY | 1 tahun | 2,000,000.00 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Pembayaran Honor pengurus barang | 36 OB | 14,400,000.00 | Pembayaran Honor pengurus barang | 36 OB | 14,400,000.00 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 9,315,000.00 | tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 9,315,000.00 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Pengisian tabung pemadam kebakaran dan BBM cold room | 1 paket | 9,315,000.00 | Pengisian tabung pemadam kebakaran dan BBM cold room | 100% | 9,315,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|---|------------------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | tercapainya Administrasi Umum perkantoran Dinkes DIY | 100% | 268,309,000.00 | tercapainya Administrasi Umum perkantoran Dinkes DIY | 100% | 277,674,000.00 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Pembelian alat listrik Dinkes DIY | 1 paket | 4,368,000.00 | Pembelian alat listrik Dinkes DIY | 1 paket | 4,368,000.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Pembelian ATK Pembelian Laptop Pembelian PC | 17 Jenis 2 Unit 2 Unit | 22,153,000.00 | Pembelian ATK Pembelian Laptop Pembelian PC | 17 Jenis 2 Unit 2 Unit | 28,208,000.00 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Pembelian alat kebersihan | 1 paket | 11,440,000.00 | Pembelian alat kebersihan | 1 paket | 11,440,000.00 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Logistik coldroom Pengisian tabung pemadam kebakaran | 270 liter 1 paket | 12,980,000.00 | Logistik coldroom Pengisian tabung pemadam kebakaran | 270 liter 1 paket | 12,980,000.00 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Barang cetakan dan penggandaan | 1 paket | 11,740,000.00 | Barang cetakan dan penggandaan | 1 paket | 14,740,000.00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Bahan bacaan surat kabar | 12 bulan | 4,416,000.00 | Bahan bacaan surat kabar | 12 bulan | 4,726,000.00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas | 1 tahun | 103,212,000.00 | Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas | 1 tahun | 103,212,000.00 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | pengembangan aplikasi/ website | 1 paket | 98,000,000.00 | pengembangan aplikasi/ website | 1 paket | 98,000,000.00 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | | Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 100% | 38,774,000.00 | Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 52,534,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKP | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|---|------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Pemerintah Daerah | | Daerah | | | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | AC PSC Komputer Laptop | 1 unit 1 unit 2 unit | 33,150,000.00 | AC PSC Komputer Laptop faksimile | 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit | 46,910,000.00 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | pembelian tangga | 2 unit | 5,624,000.00 | pembelian tangga | 2 unit | 5,624,000.00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 100% | 1,516,375,665.00 | Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 100% | 1,513,228,015.00 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Surat menyurat terproses dengan baik | 1 paket | 1,500,000.00 | Surat menyurat terproses dengan baik | 1 paket | 1,500,000.00 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Pembayaran tagihan air, listrik, telepon, fax dan zoom | 1 tahun | 548,115,000.00 | Pembayaran tagihan air, listrik, telepon, fax dan zoom | 1 tahun | 598,110,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Pembayaran honor pengelola keuangan dan pengurus barang, honor tenaga non PNS, cleaning service dan satpam | 12 bulan | 966,760,665.00 | Pembayaran honor pengelola keuangan dan pengurus barang, honor tenaga non PNS, cleaning service dan satpam | 12 bulan | 913,618,015.00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 100% | 479,341,000.00 | tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 100% | 493,841,000.00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | | Kir Pick Up Pembayaran STNK 27 roda 2 dan 23 roda 4 Terpelihara kendaraan dinas 27 roda 2 dan 23 roda 4 | 2 kali 1 tahun 1 paket | 218,091,000.00 | Kir Pick Up Pembayaran STNK 27 roda 2 dan 23 roda 4 Terpelihara kendaraan dinas 27 roda 2 dan 23 roda 4 | 2 kali 1 tahun 1 paket | 240,591,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|------------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Jabatan | | | | | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Terpelihara perlengkapan dan peralatan kantor | 1 tahun | 111,250,000.00 | Terpelihara perlengkapan dan peralatan kantor | 1 tahun | 103,250,000.00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Terpelihara gedung kantor Terpelihara lift | 1 Tahun 4 kali | 150,000,000.00 | Terpelihara gedung kantor Terpelihara lift | 1 Tahun 4 kali | 150,000,000.00 |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 56,010,676,500.00 | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 64,641,385,000.00 |
| Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | Jumlah alat kesehatan, obat, vaksin yang didistribusikan dan sarana distribusi makanan minuman yang di bina sesuai kebutuhan | 5 Kab/kota | 63,698,000.00 | Jumlah alat kesehatan, obat, vaksin yang didistribusikan dan sarana distribusi makanan minuman yang di bina sesuai kebutuhan | 5 kab/kota | 2,439,285,000.00 |
| Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | | Obat, Vaksin dan Alat kesehatan terdistribusi ke Kabupaten/Kota Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar | 5 Kab/Kot 30 sarana | 63,698,000.00 | Obat, Vaksin dan Alat kesehatan terdistribusi ke Kabupaten/Kota Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar | 5 Kab/Kot 30 sarana | 164,054,000.00 |
| Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | | Tersedianya kebutuhan obat untuk pendukung perbaikan gizi dan KIA | 1 paket | | Tersedianya kebutuhan obat untuk pendukung perbaikan gizi dan KIA | 1 paket | 2,275,231,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RPKD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|---|-------------------|--|---|-------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 55,907,923,500.00 | tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 62,163,045,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | BKK pengadaan Alat Kesehatan RSUP Saptosari hibah PMI Obat Bufferstock dan Perbekes tersedia Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan penyediaan peralatan Covid-19 reagen pemeriksaan Covid-19 | 1 paket 1 tahun 1 paket 100% 9 macam 1 paket | 50,375,913,000.00 | BKK pengadaan Alat Kesehatan RSUP Saptosari hibah PMI Obat Bufferstock dan Perbekes tersedia Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan penyediaan peralatan Covid-19 reagen pemeriksaan Covid-19 promosi pelaksanaan imunisasi | 1 tahun 1 paket 100% 9 macam 1 paket 80% 5 kab/kota | 53,495,696,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | Penyediaan Epidemiologi <24 jam | 100% | 109,805,000.00 | Penyediaan Epidemiologi <24 jam | 407 orang | 737,805,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | | Anak <1th mendapat imunisasi lengkap Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/booster persentase K4 Persentase KN1 | 95% 90% 77% 89% | 198,000,000.00 | Anak <1th mendapat imunisasi lengkap Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/booster persentase K4 Persentase KN1 | - - 4 Dokumen 100% 100% | 497,507,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | | Persentase Puskesmas PKPR | 73% | 85,166,000.00 | Persentase Puskesmas PKPR | 73% | 85,166,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|---|--|------------------|---|---|------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | | Persentase Puskesmas Santun Lansia | 94% | 22,567,000.00 | Persentase Puskesmas Santun Lansia | 94% | 22,567,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | Persentase Penurunan Balita Kurus Persentase Penurunan Ibu Hamil KEK | 2 dokumen 100% 100% | 211,416,000.00 | Persentase Penurunan Balita Kurus Persentase Penurunan Ibu Hamil KEK | 2 dokumen 100% 100% | 3,618,501,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olahraga | 1 dokumen 100% | 29,610,000.00 | Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olahraga | 1 dokumen 100% | 67,390,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | BKK jambanisasi Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) | 4 kab 180 desa /kelurahan 5 kab / kota 2365 sekolah | 29,935,000.00 | BKK jambanisasi Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) | 4 kab/kota 100% 1 dokumen 5 kab / kota 5 kab / kota | 29,935,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | Kajian Pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan Kampanye GERMAS Media Promosi Film/ Iklan Layanan Masyarakat Penerbitan Majalan Mensana | 5 kab / kota 5 kab / kota 5 kab / kota 5 kab / kota | 536,506,000.00 | Kajian Pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan Kampanye GERMAS Media Promosi Film/ Iklan Layanan Masyarakat Penerbitan Majalan Mensana | 2 dokumen 100% 100% | 1,048,230,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan | | DPS yang tersosialisasi ISTC (International Standart for Tuberculosis Care) | 125 DPS 1 tahun 5 kab/kota | 1,523,609,500.00 | DPS yang tersosialisasi ISTC (International Standart for Tuberculosis Care) | 125 DPS 1 tahun 5 | 1,724,935,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|---|--|--------------|---|---|--------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Tidak Menular | | hibah KPAD Kab/Kota yang melaksanakan PANDU PTM Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program Hepatitis Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program PISP/ Diare Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian kasus malaria Kab/Kota yang melaksanakan posbindu sesuai standar Kab/Kota yang melaksanakan skrining jiwa Kab/Kota yang melakukan gerakan 1 rumah 1 jumantik Kab/Kota yang melakukan "pemahaman stigma dan diskriminasi" HIV AIDS Klinik yang melaksanakan strategi DOTS | 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 100 klinik | | hibah KPAD -Kab/Kota yang melaksanakan PANDU PTM -Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program Hepatitis -Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program PISP/ Diare -Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian kasus malaria -Kab/Kota yang melaksanakan posbindu sesuai standar -Kab/Kota yang melaksanakan skrining jiwa -Kab/Kota yang melakukan gerakan 1 rumah 1 jumantik -Kab/Kota yang melakukan "pemahaman stigma dan diskriminasi" HIV AIDS -Klinik yang melaksanakan strategi DOTS -cakupan penemuan dan pengobatan TBC (Treatment Coverage) -jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria -presentase orang dengan HIV (OD HIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 100 klinik 15 kali | |
| Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinkes) | | FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan | 10 RS/FKTL | 7,430,000.00 | FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan | 10 RS/FKTL | 7,430,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|---|------------------|--|--|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | Kab/Kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19 | 100% 80% | 2,107,513,000.00 | Kab/Kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19 | 100% | 208,740,000.00 |
| Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | | Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan | 45 fasyankes 40 klinik 121 puskesmas 80 RS | 315,953,000.00 | Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan | 1 paket 45 fasyankes 40 klinik 121 puskesmas 80 RS | 316,803,000.00 |
| Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | Pengembangan pelayanan SPGDT | 100% | 354,500,000.00 | Pengembangan pelayanan SPGDT | 100% | 293,700,000.00 |
| Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 815000 keluarga | | Jumlah Keluarga yang Sudah dikunjungi Dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 809.313 Keluarga | 8,640,000.00 |
| Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan | 100% | 5,550,000.00 | Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan | 100% | 5,550,000.00 |
| Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | | Buku Data Kesehatan Tahun 2021 | 1 dokumen 1 dokumen | 5,100,000.00 | Buku Data Kesehatan Tahun 2021 Buku Profil Kesehatan Tahun 2021 | 1 dokumen | 5,100,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| | | Buku Profil Kesehatan Tahun 2021 Jumlah Materi tentang informasi kesehatan yang lengkap | 180 materi | | Jumlah Materi tentang informasi kesehatan yang lengkap | 1 dokumen 180 materi | |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan | 6 sistem informasi | 450,000.00 | Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan | 6 sistem informasi | 450,000.00 |
| Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pembinaan Mutu | 100% | 33,505,000.00 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pembinaan Mutu | 100% | 33,505,000.00 |
| Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan mutu | 30 Klinik Pratama 5 laboratorium 121 Puskesmas 80 Rumah Sakit | 33,505,000.00 | Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu Laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan mutu | 30 Klinik Pratama 5 laboratorium 121 Puskesmas 80 Rumah Sakit | 33,505,000.00 |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 73,130,000.00 | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 63% | 73,130,000.00 |
| Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia | 100% | 73,130,000.00 | Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 100% | 73,130,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKP | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | Kesehatan | | | | | |
| Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | FKTP dan FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana | 12 bulan | 73,130,000.00 | FKTP dan FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana | 12 bulan | 73,130,000.00 |
| PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar | 86.48% | 1,958,000.00 | Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar | 100% | 1,958,000.00 |
| Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) | | Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar | 35 sarana | 1,958,000.00 | Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar | 35 sarana | 1,958,000.00 |
| Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | | Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan | 35 sarana | 1,958,000.00 | Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan | 35 sarana | 1,958,000.00 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan | 20% | 626,313,000.00 | Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan | 20% | 532,366,000.00 |
| Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | | Terselenggaranya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional | 100% | 626,313,000.00 | Terselenggaranya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional | 100% | 532,366,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|---|--|----------------|--|---|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | | 1. Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional 2. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Jamu Herbal 3. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi 4. Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan 5. Workshop Sainifikasi Jamu 6. Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu dan Layanan Kestraddi Dinkes DIY 7. Pengembangan Yankestraddi Dinkes DIY 8.a. Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional 8.b. Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional 8.c. Pameran Jamu Herbal dan Kestraddi DIY 8.d. Lomba Film, Vlog, dan liputan Kestraddi 8. Promosi Kesehatan Tradisional | 2 dokumen 40 orang 40 orang 30 orang 30 orang 1 dokumen 2 dokumen 1 event 1 event 1 event 3 event 0 event | 626,313,000.00 | 1. Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional 2. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Jamu Herbal 3. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi 4. Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan 5. Workshop Sainifikasi Jamu 6. Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu dan Layanan Kestraddi Dinkes DIY 8.a. Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional 8.b. Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional 8.c. Pameran Jamu Herbal dan Kestraddi DIY 8.d. Lomba Film, Vlog, dan liputan Kestraddi 8. Promosi Kesehatan Tradisional | 1 event 3 event 2 dokumen 20 orang 20 orang 30 orang 30 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 event | 532,366,000.00 |
| Bapel Jamkessos | | | | | | | |
| 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|---------------------------------------|------------------|---|--|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| DAERAH PROVINSI | | | | | | | |
| 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 1,986,351,878.00 | | | 31,860,000.00 |
| 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | -/Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN/- | -/1 Tahun/- | 1,954,491,878.00 | | | - |
| 1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | -/Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD/- | 100 persen/ 100 persen/ 1 Tahun | 31,860,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah /Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan OPD | 100 persen/10 0 persen/1 Tahun | 31,860,000.00 |
| 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 9,060,000.00 | | | 9,060,000.00 |
| 1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | -/Terlaksananya penatusahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku/- | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 9,060,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah/Terlaksananya penatusahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 9,060,000.00 |
| 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 554,436,000.00 | | | 522,483,000.00 |
| 1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | | -/Tersedianya Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor/- | 100 persen/ 1 Tahun/6 jenis | 6,967,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor | 100 persen/ 1 Tahun/6 jenis | 6,967,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|--|----------------|---|--|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| 1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | -/Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya perlengkapan protokol kesehatan kantor, Tersedianya perlengkapan protokol kesehatan kantor/- | 100 persen/ 1 Tahun/ 51 jenis, 1 tahun | 134,509,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Tersedianya perlengkapan protokol kesehatan kantor, Tersedianya perlengkapan protokol kesehatan kantor | 100 persen/ 1 Tahun/ 51 jenis, 1 tahun | 134,509,000.00 |
| 1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | -/Tersedianya peralatan rumah tangga/- | 100 persen/ 1 Tahun/6 jenis | 25,790,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya peralatan rumah tangga | 100 persen/ 1 Tahun/6 jenis | 22,142,000.00 |
| 1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | -/Tersedianya bahan logistik kantor berupa APAR yang siap digunakan, Tersedianya jumlah bahan logistik kantor berupa penyediaan extrafooding bagi pegawai/- | 100 persen/ 1 Tahun/ 5 jenis, 40 orang | 84,216,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya bahan logistik kantor berupa APAR yang siap digunakan, Tersedianya jumlah bahan logistik kantor berupa penyediaan extrafooding bagi pegawai | 100 persen/ 1 Tahun/ 5 jenis, 40 orang | 84,216,000.00 |
| 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | -/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/- | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 40,492,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 40,490,000.00 |
| 1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | -/Langganan surat dan majalah/- | 100 persen/ 1 Tahun/ 2 jenis | 2,580,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Langganan surat dan majalah | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 jenis | 1,200,000.00 |
| 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | -/Tersedianya makanan dan minuman rapat, Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi/- | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 259,882,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah/Tersedianya makanan dan | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 232,959,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKP | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|--|----------------|---|--|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| | | | | | minuman rapat, Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi | | |
| 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud | | -/Tersedianya sistem aplikasi pelayanan penjaminan kesehatan Bapel Jamkessos DIY/- | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 30,000,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan Kantor/Tersedianya sistem aplikasi pelayanan penjaminan kesehatan Bapel Jamkessos DIY | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 30,000,000.00 |
| 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 481,256,844.00 | | | 498,337,600.00 |
| 1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | -/Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik/- | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 99,650,400.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah/Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 persen/ 1 Tahun/ 1 Tahun | 103,500,400.00 |
| 1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | -/Arsip kantor terkelola dengan baik, Keamanan kantor terjaga dengan baik, Kebersihan kantor terjaga dengan baik, Penyediaan pengelolaan air limbah, Penyediaan retribusi sampah/- | 100 persen/ 1 Tahun/12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan | 381,606,444.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah/Arsip kantor terkelola dengan baik, Keamanan kantor terjaga dengan baik, Kebersihan kantor terjaga dengan baik, Penyediaan pengelolaan air limbah, Penyediaan retribusi sampah | 100 persen/ 1 Tahun/12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan | 394,837,200.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|--|---------------|---|--|---------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 91,549,000.00 | | | 91,549,000.00 |
| 1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | -/Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda dua yang tepatwaktu, Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda empat yang tepatwaktu, Kendaraan dinas operasional roda dua terpelihara sesuai RKBMD, Kendaraan dinas operasional roda empat terpelihara sesuai RKBMD/- | 100 persen/100 persen/3 unit, 3 unit, 3 unit | 57,549,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda dua yang tepatwaktu, Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan dinas operasional roda empat yang tepatwaktu, Kendaraan dinas operasional roda dua terpelihara sesuai RKBMD, Kendaraan dinas operasional roda empat terpelihara sesuai RKBMD | 100 persen/100 persen/3 unit, 3 unit, 3 unit | 57,549,000.00 |
| 1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | -/Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada gedung BCB, Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada gedung non BCB/- | 100 persen/100 persen/1 unit, 3 unit | 30,000,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada gedung BCB, Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya pada gedung non BCB | 100 persen/100 persen/1 unit, 3 unit | 30,000,000.00 |
| 1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | -/Terpeliharanya jaringan instalasi listrik/- | 100 persen/100 persen/1 Tahun | 4,000,000.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran//Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Terpeliharanya jaringan instalasi listrik | 100 persen/100 persen/1 Tahun | 4,000,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|---|--|--------------------------|--|---|--------------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 69,518,620,960.00 | | | 43,240,714,965.00 |
| 1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | -/Cakupan Jaminan Kesehatan Penyangga Cakupan Jaminan Kesehatan Preventif Cakupan Jaminan Kesehatan Rehabilitatif/- | -/100 Persen 12 persen 25 persen/- | 69,518,620,960.00 | Prosentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular/ Prosentase jenis layanan Jamkessos diakses masyarakat/ Cakupan Jaminan Kesehatan Penyangga Cakupan Jaminan Kesehatan Preventif Cakupan Jaminan Kesehatan Rehabilitatif | 62,84 Persen/ 100 Persen / 100 Persen 12 persen 25 persen | 43,240,714,965.00 |
| Balai Labkes dan Kalibrasi | | | | | | | |
| 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Rp 34,704,091,001 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Rp 36,269,210,537 |
| 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | Rp 3,911,695,524 | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | Rp 35,760,000 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|---|----------------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK | 12 Bulan | Rp 3,875,935,524 | | | Rp - |
| 1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12 Bulan | Rp 35,760,000 | Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 12 Bulan | Rp 35,760,000 |
| 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 Persen | Rp 15,000,000 | Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 Persen | Rp 15,000,000 |
| 1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Pembayaran Honorarium Pengurus Barang Pembantu | 12 Bulan | Rp 15,000,000 | Pembayaran Honorarium Pengurus Barang Pembantu | 12 Bulan | Rp 15,000,000 |
| 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Rp 155,064,000 | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | Rp 155,064,000 |
| 1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Penyediaan Makanan Minuman Harian Umum (Extrafooding) | 12 Bulan | Rp 155,064,000 | Penyediaan Makanan Minuman Harian Umum (Extrafooding) | 12 Bulan | Rp 155,064,000 |
| 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Rp 24,342,837,591 | Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | Rp 24,342,837,591 |
| 1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Komputer Monitor UPS | 6 Unit 1 Unit 2 Unit | Rp 132,018,000 | Komputer Monitor UPS | 6 Unit 1 Unit 2 Unit | Rp 132,018,000 |
| 1.02.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | Buku SNI | 2 Buku | Rp 7,859,591 | Buku SNI | 2 Buku | Rp 7,859,591 |
| 1.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Terbangunnya Gedung Laboratorium | 1 Unit | Rp 24,166,960,000 | Terbangunnya Gedung Laboratorium | 1 Unit | Rp 24,166,960,000 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|---|--|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| 1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | AC Penangkal Petir | 1 Unit 1 Paket | Rp 36,000,000 | AC Penangkal Petir | 1 Unit 1 Paket | Rp 36,000,000 |
| 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Rp 1,136,441,886 | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Rp 1,151,000,850 |
| 1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Belanja Telepon, Air, Listrik dan Fax | 12 Bulan | Rp 526,888,800 | Belanja Telepon, Air, Listrik dan Fax | 12 Bulan | Rp 526,888,800 |
| 1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Pembayaran Jasa Keamanan Kantor Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Jasa Pencucian Alat-Alat Laboratorium | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | Rp 609,553,086 | Pembayaran Jasa Keamanan Kantor Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Jasa Pencucian Alat-Alat Laboratorium | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | Rp 624,112,050 |
| 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Rp 193,052,000 | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | Rp 193,052,000 |
| 1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Pemeliharaan Gedung Bangunan Tempat Kerja | 12 Bulan | Rp 193,052,000 | Pemeliharaan Gedung Bangunan Tempat Kerja | 12 Bulan | Rp 193,052,000 |
| 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | Peningkatan Kunjungan Pelanggan | 220 Pelanggan | Rp 4,950,000,000 | Peningkatan Kunjungan Pelanggan | 220 Pelanggan | Rp 10,376,496,096 |
| 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Akreditasi Laboratorium Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Sumber Daya | 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Paket 3 Macam | Rp 4,950,000,000 | Akreditasi Laboratorium Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) | 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Paket | Rp 10,376,496,096 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|---|-------------------------|---|--|-------------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| | | Manusia (SDM) Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Untuk Mendukung Operasional Perkantoran Berjalan Optimal 100% Promosi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi | 12 Bulan 12 Bulan 7 Jenis | | Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Untuk Mendukung Operasional Perkantoran Berjalan Optimal 100% Promosi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi | 3 Macam 12 Bulan 12 Bulan 7 Jenis | |
| 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | Rp 8,889,983,992 | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | | Rp 9,410,498,842 |
| 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | Rp - | Indeks Kepuasan Pelanggan | 88 Persen | Rp 4,636,576,450 |
| 1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | | | | Rp - | Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara | 84 Unit | Rp 4,636,576,450 |
| 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk | | Indeks Kepuasan Pelanggan | 88 Persen | Rp 8,889,983,992 | Indeks Kepuasan Pelanggan | 88 Persen | Rp 4,773,922,392 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|---|-------------------------|------------------|---|----------------|------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| 1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Bapelkes | | Penyediaan Alat-Alat Laboratorium Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya | 32 Macam 2 Jenis | Rp 8,889,983,992 | Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya | 2 Jenis | Rp 4,773,922,392 |
| 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 8,076,426,163.00 | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 8,076,426,163.00 |
| 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 24,660,000.00 | Terlaksanakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 24,660,000.00 |
| - | | Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | - | - | - | - |
| 1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 1 Tahun | 24,660,000.00 | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 1 Tahun | 24,660,000.00 |
| 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah | 1 Tahun | 10,320,000.00 | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah | 100% | 10,320,000.00 |
| 1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah | | Terlaksananya Penatausahaan BMD Sesuai Ketentuan yang Berlaku | 1 Tahun | 10,320,000.00 | Terlaksananya Penatausahaan BMD Sesuai Ketentuan yang Berlaku | 1 Tahun | 10,320,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| pada SKPD | | | | | | | |
| 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Tahun | 142,828,500.00 | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 142,828,500.00 |
| 1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Tahun | 24,092,000.00 | Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 24,092,000.00 |
| 1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Tahun | 53,500,500.00 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | 53,500,500.00 |
| 1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 1 Tahun | 37,101,000.00 | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 12 Bulan | 37,101,000.00 |
| 1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Tersedianya Bahan logistik Kantor | 1 Tahun | 1,996,000.00 | Tersedianya Bahan logistik Kantor | 12 Bulan | 1,996,000.00 |
| 1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Tahun | 13,389,000.00 | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | 13,389,000.00 |
| 1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat | 1 Tahun | 12,750,000.00 | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat | 12 Bulan | 12,750,000.00 |
| 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | | Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan Kantor | 1 Tahun | 85,565,000.00 | Terlaksanakannya Pengadaan Peralatan Kantor | 100% | 85,565,000.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| 1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Tahun | 85,565,000.00 | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pelatihan Daring | 1 Paket | 85,565,000.00 |
| 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1,179,757,200.00 | Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 1,179,757,200.00 |
| 1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 1,000,000.00 | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 1,000,000.00 |
| 1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 294,542,000.00 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Bulan | 294,542,000.00 |
| 1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 884,215,200.00 | Terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 884,215,200.00 |
| 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 330,627,400.00 | Terlaksanakannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 330,627,400.00 |
| 1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan | | Terbayarnya Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 | 1 Tahun 1 Tahun | 86,947,400.00 | Terbayarnya Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor | 10 Unit 12 Bulan | 86,947,400.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|---|----------------------|------------------|---|----------------------|------------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Operasional Kantor | | | | | |
| 1.02.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel | | Tersedianya Pemeliharaan Mebel | 1 Tahun | 3,100,000.00 | Tersedianya Pemeliharaan Mebel | 12 Bulan | 3,100,000.00 |
| 1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1 Tahun | 40,680,000.00 | Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 12 Bulan | 40,680,000.00 |
| 1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor | 1 Tahun | 169,000,000.00 | Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 169,000,000.00 |
| 1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Terpeliharanya Sarana Prasarana dan Bangunan Kantor | 1 Tahun | 30,900,000.00 | Terpeliharanya Sarana Prasarana dan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 30,900,000.00 |
| 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan | 84% | 6,302,668,063.00 | Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan | 86% | 6,302,668,063.00 |
| 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan dari Jasa Layanan BLUD Pelayanan Pendukung dan Penunjang Pelayanan BLUD | 32 Kegiatan 12 Bulan | 6,302,668,063.00 | Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan dari Jasa Layanan BLUD Pelayanan Pendukung dan Penunjang Pelayanan BLUD | 32 Kegiatan 12 Bulan | 6,302,668,063.00 |
| 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya | 68% | 165,288,500.00 | Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya | 68% | 165,288,500.00 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|---|----------------|--|---|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan | 86% | 165,288,500.00 | Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan | 86% | 165,288,500.00 |
| 1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | | Audit Mutu Internal Bapelkes Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Grand Design Laboratorium Kelas yang Dibuat Grand Design Laboratorium Lapangan yang Dibuat Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran yang Mendukung Operasional Bapelkes Kurikulum Pelatihan yang Dibuat Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan Pengembangan Sistem Pembelajaran | 2 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 1 Kurikulum 1 Kegiatan 1 Sistem | 165,288,500.00 | Audit Mutu Internal Bapelkes Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Grand Design Laboratorium Kelas yang Dibuat Grand Design Laboratorium Lapangan yang Dibuat Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran yang Mendukung Operasional Bapelkes Kurikulum Pelatihan yang Dibuat Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan Pengembangan Sistem Pembelajaran | 2 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 1 Kurikulum 1 Kegiatan 1 Sistem | 165,288,500.00 |
| RSJ GRHASIA | | | | | | | |
| 1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | | Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | |
| 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Peringkat Daerah | | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, naban | 1 Tahun | | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, naban | 1 Tahun | |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|--|----------------|--|--|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Gaji dan tunjangan ASN / Naban | 1 Tahun | 38,384,349,618 | Gaji dan tunjangan ASN / Naban | 1 Tahun | 39,544,956,722 |
| 1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 62.84% | | Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 62.84% | |
| 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza | 1 Tahun | | Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza | 1 Tahun | |
| 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | 1. Jumlah kunjungan diklat 2. Jumlah praktikan 3. Penanganan pasien rawat inap 4. Penanganan pasien rawat jalan | 1. 4.400 kunjungan 2. 2.400 orang 3. 2.016 pasien 4. 42.938 kunjungan | 20,500,000,000 | 1. Jumlah kunjungan diklat 2. Jumlah praktikan 3. Penanganan pasien rawat inap 4. Penanganan pasien rawat jalan | 1. 4.400 kunjungan 2. 2.400 orang 3. 2.016 pasien 4. 42.938 kunjungan | 31,367,158,728 |
| 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | | Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 62.84% | | Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular | 62.84% | |
| 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan | | Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza | 1 Tahun | | Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza | 1 Tahun | |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|---|--|----------------|---|--|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | | | | |
| 1.02.02.1.02.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | Pembangunan gedung trauma healing dan visum et repertum | 1 Paket | 4,012,168,000 | Pembangunan gedung trauma healing dan visum et repertum | 1 Paket | 4,012,168,000 |
| 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza | 1 Tahun | | Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan napza | 1 Tahun | |
| 1.02.02.1.01.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | 1. Pengadaan hardware SIMRS 2. Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing dan visum et repertum 3. Pengadaan perlengkapan ruang isolasi 4. Penyusunan dokumen AMDAL lingkungan | 1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket 4. 1 Paket | 1,785,101,450 | 1. Pengadaan hardware SIMRS 2. Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing dan visum et repertum 3. Pengadaan perlengkapan ruang isolasi 4. Penyusunan dokumen AMDAL lingkungan | 1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket 4. 1 Paket | 1,785,101,450 |
| RS PARU RESPIRA | | | | | | | |
| 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 22,396,294,591 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 44,324,763,702 |
| 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 10,568,262,591 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 20,418,173,501 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|---|--|----------------|---|--|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN | 1 tahun | 10,510,302,591 | Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN | 1 tahun | 20,360,213,501 |
| 1.02.02.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD | 1 tahun | 57,960,000 | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD | 1 tahun | 57,960,000 |
| 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 19,800,000 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 19,800,000 |
| 1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1 tahun | 19,800,000 | Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1 tahun | 19,800,000 |
| 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 1,408,232,000 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 730,160,000 |
| 1.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel | | Tersedianya Mebel Di RSP Respira | 9 jenis | 159,476,000 | Tersedianya Mebel Di RSP Respira | 9 jenis | 47,446,000 |
| 1.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | - Tersedianya alat komunikasi telepon - Tersedianya alat penghancur kertas - Tersedianya peralatan komputer lainnya - Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat dapur - Tersedianya komputer PC | - 2 jenis - 2 buah - 8 jenis - 7 jenis - 14 unit | 329,114,000 | - Tersedianya alat komunikasi telepon - Tersedianya alat penghancur kertas - Tersedianya peralatan komputer lainnya - Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat dapur - Tersedianya komputer PC dan laptop - Tersedianya Alat Kantor lainnya - Tersedianya Power supply | - 1 unit - 0 jenis - 0 jenis - 7 jenis - 0 jenis - 2 jenis - 10 unit - 3 Jenis - 3 Jenis | 316,064,000 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|---|---|----------------|--|---|----------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| | | dan Laptop | | | - Tersedianya Peralatan komputer - Tersedianya Personal Komputer | | |
| 1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | - Tersedianya AC, Kipas dan exhaust fan - Tersedianya kamera CCTV - Tersedianya tambah daya listrik | - 30 unit - 1 paket - 1 paket | 919,642,000 | - Tersedianya AC, Kipas dan exhaust fan - Tersedianya kamera CCTV - Tersedianya tambah daya listrik | - 30 unit - 1 paket - 1 paket | 366,650,000 |
| 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 10,400,000,000 | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 23,156,630,201 |
| 1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | - Tersedianya Administrasi Perkantoran - Tersedianya Akreditasi RS - Tersedianya Jasa Pelayanan RS - Tersedianya Kegiatan Peningkatan Mutu - Tersedianya Kegiatan Promosi Kesehatan - Tersedianya Listrik, Telpon dan Air - Tersedianya Pelayanan oleh pihak ketiga - Tersedianya Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan - Tersedianya pemeliharaan rumah tangga rumah sakit - Tersedianya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan - Tersedianya Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan | - 7 Jenis - 1 dokumen - 6 kali - 11 Kegiatan - 3 Kegiatan - 1 tahun - 5 Jenis - 12 Bulan - 12 Bulan - 4 jenis - 5 Kegiatan - 6 Jenis - 20 Orang | 10,400,000,000 | - Tersedianya Administrasi Perkantoran - Tersedianya Akreditasi RS - Tersedianya Jasa Pelayanan RS - Tersedianya Kegiatan Peningkatan Mutu - Tersedianya Kegiatan Promosi Kesehatan - Tersedianya Listrik, Telpon dan Air - Tersedianya Pelayanan oleh pihak ketiga - Tersedianya Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan - Tersedianya pemeliharaan rumah tangga rumah sakit - Tersedianya Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan - Tersedianya Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan - Tersedianya Saran Penunjang Pelayanan - Tersedianya Tenaga Non PNS | - 7 Jenis - 1 dokumen - 6 kali - 11 Kegiatan - 3 Kegiatan - 1 tahun - 5 Jenis - 12 Bulan - 12 Bulan - 4 jenis - 5 Kegiatan - 6 Jenis - 22 Orang - 1 unit - 4 Unit | 23,156,630,201 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|--|--------|--|---|----------------|--|---|---------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| | | - Tersedianya Saran Penunjang Pelayanan - Tersedianya Tenaga Non PNS | | | - Tersedianya UPS Server - Tersedianya Printer Thermal - Tersedianya buku obat - Tersedianya keranjang obat - Terlaksananya Review DED | - 15 buah - 25 buah - 1 paket | |
| 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 10,413,708,000 | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 9,761,512,940 |
| 1.02.02.1.01 Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 8,848,130,000 | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 8,195,934,940 |
| 1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit | | - Terbentuknya tim persiapan pengadaan tanah - Terselenggaranya konsultasi publik/konsultasi ulang - Terbentuknya tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan - Tersedianya dokumen penetapan lokasi - Terselenggaranya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah | - 1 tim - 1 paket - 1 tim - 1 dokumen - 4 Tahap | 2,659,700,000 | - Terbentuknya tim persiapan pengadaan tanah - Terselenggaranya konsultasi publik/konsultasi ulang - Terbentuknya tim kajian keberatan atas lokasi rencana pembangunan - Tersedianya dokumen penetapan lokasi - Terselenggaranya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah | - 1 tim - 1 paket - 0 tim - 1 dokumen - 1 Tahap | 1,251,400,000 |

| Uraian | Lokasi | Rancangan Awal RKPD | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | |
|---|--------|--|------------------------|---------------|--|------------------------|---------------|
| | | Indikator | Target Capaian | Jumlah | Indikator | Target Capaian | Jumlah |
| 1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | | Tersedianya Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan | 17 Jenis | 636,100,000 | Tersedianya Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan | 108 unit | 1,392,204,940 |
| 1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | | Tersedianya Obat-obatan untuk pasien | 2 paket | 5,552,330,000 | Tersedianya Obat-obatan untuk pasien | 2 paket | 5,552,330,000 |
| 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 1,565,578,000 | Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | 62.84% | 1,565,578,000 |
| 1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | - Tersedianya Alat Bengkel - Tersedianya BMHP dan Reagen | - 3 jenis - 2 paket | 1,565,578,000 | - Tersedianya Alat Bengkel - Tersedianya BMHP dan Reagen | - 3 jenis - 2 paket | 1,565,578,000 |

Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada bagian lampiran, memuat Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, maka sebagian besar program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi adalah memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/ Kota, disamping program dan kegiatan yang langsung ditujukan ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku kepentingan yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) DIY, yang ditujukan untuk mendukung kesekretariatan (operasional). Sejak diberlakukannya Pergub DIY No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, Dinkes DIY juga mengakomodir dana hibah dan memfasilitasi bantuan keuangan khusus (BKK) dari usulan kabupaten/ kota diantaranya adalah BKK untuk penyediaan sarana jamban sehat (Jambanisasi) dan dukungan pemenuhan standar alat kesehatan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 2-15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

| Tahun Alokasi | Program | Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran (Rp) |
|---------------|---|------------------------------------|--------|-------------------|--------------|
| 2010 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | DIY | KPAD | 172.570.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 108.000.000 |
| 2011 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | DIY | KPAD | 89.990.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 179.669.000 |
| 2012 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | DIY | KPAD | 270.815.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 389.342.200 |
| 2013 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | DIY | KPAD | 286.000.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 243.662.800 |
| 2014 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | DIY | KPAD | 292.398.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 239.801.000 |

| Tahun Alokasi | Program | Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran (Rp) |
|---------------|---|--|--------|--------------------------|----------------|
| 2015 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | DIY | KPAD | 400.000.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 400.000.000 |
| 2016 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | DIY | KPAD | 463.229.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 620.000.000 |
| 2017 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | DIY | KPAD | 564.818.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 443.156.000 |
| 2018 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | DIY | KPAD | 500.000.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan | Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus | DIY | PMI | 420.000.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan | Peingkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain | DIY | BKK RSUD Wates | 70.000.000.000 |
| | Program Kesehatan Masyarakat | Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat | DIY | BKK Jambanisasi | 1.036.000.000 |
| 2019 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | DIY | KPAD | 500.000.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain | DIY | PMI | 500.000.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain | DIY | BKK Pembangan RSUD Wates | 70.000.000.000 |
| | Program Kesehatan Masyarakat | Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat | DIY | BKK Jambanisasi | 2.000.000.000 |

| Tahun Alokasi | Program | Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran (Rp) |
|---------------|---|--|--------|---------------------------------------|----------------|
| 2020 | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | DIY | KPAD | 500.000.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain | DIY | PMI | 500.000.000 |
| | Program Pelayanan Kesehatan | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan lain | DIY | BKK Pembang una n RSUD Wates | 40.810.000.000 |
| | Program Kesehatan Masyarakat | Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat | DIY | BKK Jambanisasi | 3.378.000.000 |
| 2021 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | DIY | KPAD | 500.000.000 |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | DIY | PMI | 500.000.000 |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan | DIY | BKK Jambanisasi | 1.525.000.000 |
| 2022 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan | DIY | KPAD | 500.000.000 |

| Tahun Alokasi | Program | Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran (Rp) |
|---------------|---|--|--------|---|----------------|
| | | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | DIY | PMI | 500.000.000 |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan | DIY | BKK Jambanisasi | 1.525.000.000 |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Keg: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub keg: Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | DIY | BKK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Saptosari | 27.427.517.771 |

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan Pengembangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh program RPJMN 2020-2024 terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY adalah *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Bertitik tolak dari dasar filosofi, kondisi dan aspek-aspek potensial, serta perkembangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, maka ditetapkan visi pembangunan DIY yang akan dicapai dalam 2005 sampai dengan 2025 adalah : **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Salah satu definisi masyarakat yang maju adalah masyarakat yang derajat kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Tema pembangunan tahun 2023 yaitu "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan". Tema tersebut dipilih dengan dasar pemikiran bahwa dalam rangka perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, maka DIY harus memiliki daya saing di berbagai sektor

untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan pada tema tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM (pendidikan , kesehatan dan budaya)
2. pemulihan ekonomi
3. Penurunan Kemiskinan
4. Pengurangan gap ketimpangan wilayah
5. Peningkatan kualitas layanan publik
6. Menjaga daya dukung lingkungan.

Identifikasi permasalahan terkait kesehatan sesuai RKPD yaitu:

1. Belum meratanya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada terutama RS dan ketersediaan dokter spesialis
2. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu ditingkatkan dan perlunya pendampingan keluarga sehat
3. Tantangan ke depan kebosanan melaksanakan protokol kesehatan semakin menurun
4. Mengupayakan RSUD/ Puskesmas mempunyai elektronik rekam medis
5. Kondisi RSUD dan puskesmas yang belum ramah terhadap lansia, anak- anak, serta difabel/ penyandang disabilitas.

Rekomendasi kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Mengusulkan indikator terbaru disesuaikan dengan pusat, baik indikator pembangunan, sarana dan prasarana dan tenaga medis
2. Pelayanan melalui protokol kesehatan tetap dijaga, juga dipertimbangkan tenaga medis yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai hal
3. Perlu diperhatikan tumbuh kembang, pendidikan anak di masa pandemi dan imunisasi anak serta pemberian tambahan makanan
4. Meningkatkan pola hidup sehat dan sadar kebutuhan gizi (kalori) untuk menunjang standar pola hidup sehat dan kecukupan kalori yang erat kaitannya dengan standar hidup sehat menurut WHO
5. Perlu dukungan yang nyata dan serius untuk menemukan dan mengobati penyakit menular terutama TB untuk mencapai tujuan zero TB di tahun 2030.
6. Pemberian gaji yang layak bagi pegawai di Rumah Sakit baik negeri maupun swasta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

| NO. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|-----|--------|-------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | Penurunan Jumlah kasus kematian ibu | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Penurunan Jumlah kasus kematian bayi | 340 | 336 | 327 | 323 | 318 |
| | | Prevalensi balita kurang gizi (KEP) | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.4 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN | | | | | |
|-----|---|--|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Terwujudnya perilaku sadar sehat | Presentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga | % | 67,77 (82) | 100 (121) | 100 (121) | 100 (121) | 100 (121) | 100 (121) |
| 2. | Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu | Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi | % | 64.89 170 | 67.18 176 | 69.08 181 | 70.99 186 | 73.28 192 | 70,99 192 |
| 3 | Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu | Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa | % | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 70 |
| 4 | Terwujudnya pelayanan kesehatan Paru yang bermutu | Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan* | % | 73.20 | 74.8 | 77.2 | 78.9 | 81.3 | 78,9 |

Catatan :* Kesehatan Paru

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan hal hal / isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan DIY tahun 2023. Secara rinci, rencana kerja yang dituangkan dalam usulan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|---|--|-----------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | |
| 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 150.052.916.645 | | | | 198.143.712.015 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 45.125.000 | | | | 49.637.500 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 35.125.000 | | | 4 | 38.637.500 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2.500.000 | | | 2 | 2.750.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 15 | 7.500.000 | | | 15 | 8.250.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 90.587.509.929 | | | | 91.725.491.200 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bln | 260 | 31.905.947.629 | | | 260 | 32.353.591.762 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Respira) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bln | 171 | 20.052.412.682 | | | 171 | 20.280.030.663 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Grhasia) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bln | 321 | 38.384.349.618 | | | 337 | 38.846.097.875 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinkes) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 70.200.000 | | | 12 | 77.200.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BLKK) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 36.360.000 | | | 4 | 36.360.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapel Jamkesos) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 31.860.000 | | | 4 | 31.860.000 |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|--|--|---------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapelkes) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 24.600.000 | | | 4 | 24.600.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Respira) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 75.780.000 | | | 4 | 69.420.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinkes) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1.662.000 | | | 1 | 1.776.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Dinkes) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Laporan | 25 | 4.338.000 | | | 25 | 4.554.900 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 74.180.000 | | | | 74.180.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 2.000.000 | | | 1 | 2.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 14.400.000 | | | 1 | 14.400.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BLKK) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 18.600.000 | | | 1 | 18.600.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapel Jamkesos) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 9.060.000 | | | 1 | 9.060.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 10.320.000 | | | 1 | 10.320.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Respira) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 19.800.000 | | | 1 | 19.800.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 9.500.000 | | | | 9.500.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 30 | 9.500.000 | | | 30 | 9.500.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 2.135.069.000 | | | | 2.114.741.300 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.500.000 | | | 1 | 5.000.000 |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|---|--|--------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapel Jamkesos) | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.967.000 | | | 1 | 7.663.700 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapelkes) | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 29.989.500 | | | 1 | 32.988.450 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 24.150.000 | | | 1 | 26.100.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapel Jamkesos) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 142.370.000 | | | 1 | 142.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapelkes) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 52.696.500 | | | 1 | 57.966.150 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | | | 1 | 15.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapel Jamkesos) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 24.350.000 | | | 2 | 26.785.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BLKK) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 951.720.000 | | | 2 | 1.046.892.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapelkes) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 49.984.000 | | | 1 | 54.982.400 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | | | 1 | 15.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BLKK) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 170.820.000 | | | 1 | 187.902.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapel Jamkesos) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 90.000.000 | | | 2 | 94.500.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapelkes) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 16.256.000 | | | 1 | 17.881.600 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 13.000.000 | | | 1 | 13.000.000 |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|---|---|---------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapel Jamkesos) | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 45.000.000 | | | 1 | 48.500.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapelkes) | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 15.500.000 | | | 1 | 17.050.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan | Dokumen | 12 | 4.600.000 | | | 12 | 5.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bapel Jamkesos) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan | Dokumen | 2 | 3.600.000 | | | 2 | 4.680.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 105.000.000 | | | 1 | 105.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapel Jamkesos) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 151.766.000 | | | 2 | 157.850.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 30.000.000 | | | 2 | 33.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 107.800.000 | | | 0 | - |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Jamkesos) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 65.000.000 | | | 0 | - |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 3.379.445.400 | | | | 56.791.580.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 500.000.000 | | | 0 | - |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel (Dinkes) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 0 | - | | | 0 | - |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel (Respira) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 113.219.000 | | | 1 | 45.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel (BLKK) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 741.300.000 | | | 1 | 555.975.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (BLKK) | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | 1 | 7.100.000 | | | 0 | - |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 22 | 328.750.000 | | | 30 | 322.000.000 |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|--|--|---------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLKK) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 21 | 279.000.000 | | | 5 | 279.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 230.210.000 | | | 1 | 253.231.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Respira) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 29 | 616.742.400 | | | 15 | 250.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapel Jamkesos) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 40.000.000 | | | 0 | - |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinkes) | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 250.000.000 | | | 1 | 55.000.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 190.000.000 | | | 0 | - |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 5.624.000 | | | 2 | 5.624.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 25 | 32.500.000 | | | 2 | 35.750.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Respira) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | 45.000.000 | | | 4 | 45.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 4.868.824.716 | | | | 5.425.167.915 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1.500.000 | | | 1 | 1.500.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1.500.000 | | | 1 | 1.650.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 616.820.000 | | | 1 | 700.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLKK) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 599.163.000 | | | 3 | 718.995.600 |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|--|--|---------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapel Jamkesos) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 104.750.000 | | | 3 | 109.980.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 328.394.000 | | | 1 | 361.233.400 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 950.000.000 | | | 1 | 950.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BLKK) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 4 | 884.414.276 | | | 4 | 1.061.297.131 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapel Jamkesos) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 4 | 409.641.720 | | | 4 | 450.605.892 |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 972.641.720 | | | 1 | 1.069.905.892 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.349.061.000 | | | | 1.288.577.100 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinkes) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 50 | 233.150.000 | | | 50 | 233.150.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapel Jamkesos) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 6 | 58.500.000 | | | 6 | 61.425.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapelkes) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 10 | 90.104.000 | | | 10 | 99.114.400 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel (Bapelkes) | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 1 | 15.000.000 | | | 1 | 16.500.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 150.000.000 | | | 1 | 150.000.000 |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|----|---|--|--------|----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 56.507.000 | | | 1 | 62.157.700 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinkes) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 180.000.000 | | | 1 | 180.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 100.000.000 | | | 4 | 72.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapelkes) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 300.000.000 | | | 1 | 330.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 90.000.000 | | | 0 | - |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 6.500.000 | | | 4 | 8.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 69.300.000 | | | 4 | 76.230.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 47.604.201.600 | | | | 40.664.837.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BLKK) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 5.994.201.600 | | | 1 | 5.772.100.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Bapelkes) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 3.650.000.000 | | | 1 | 3.630.000.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Grhasia) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 20.360.000.000 | | | 1 | 20.599.900.000 |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Respira) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 17.600.000.000 | | | 1 | 10.662.837.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------|----|-----------------|--|--|----|-----------------|
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 306.397.556.310 | | | | 172.813.454.450 |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 204.999.073.610 | | | | 82.642.288.750 |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | Unit | 2 | 6.336.275.110 | | | 4 | 52.692.677.250 |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 03 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 1 | 175.000.000.000 | | | 1 | 10.450.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 41 | 4.783.500.000 | | | 15 | 256.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 12 | Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1.104.930.000 | | | - | - |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 15 | Pengadaan dan pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara | Unit | 16 | 4.902.764.000 | | | 15 | 3.049.700.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 6 | 406.604.500 | | | 4 | 234.911.500 |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes) | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | Paket | 1 | 2.500.000.000 | | | 1 | 2.600.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | Paket | 2 | 5.965.000.000 | | | 2 | 6.859.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | Paket | 2 | 4.000.000.000 | | | 2 | 6.500.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------|-----|----------------|--|--|-----|----------------|
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 97.554.695.200 | | | | 90.124.208.700 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (DRK) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 130 | 788.605.000 | | | 145 | 793.305.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Farmakmin) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 130 | 250.000.000 | | | 145 | 265.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (BLKK) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 130 | 22.000.000.000 | | | 145 | 16.940.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 407 | 300.635.500 | | | 407 | 330.699.050 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Dokumen | 6 | 484.050.000 | | | 6 | 523.100.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 5 | 228.630.000 | | | 5 | 300.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut | Dokumen | 3 | 24.824.000 | | | 3 | 30.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 8 | 3.625.060.000 | | | 8 | 3.650.000.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 2 | 106.850.000 | | | 2 | 138.905.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 4 | 117.290.000 | | | 4 | 152.477.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen | 3 | 1.204.720.000 | | | 3 | 1.325.192.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular) | Dokumen | 10 | 1.549.710.000 | | | 11 | 1.704.681.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 2 | 56.726.000 | | | 2 | 56.726.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----------|----|----------------|--|--|---|----------------|
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bapel Jamkesos) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 6 | 59.825.929.000 | | | 6 | 57.553.250.500 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1 | 229.614.000 | | | 1 | 252.575.400 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (DRK) | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Dokumen | 4 | 487.280.000 | | | 4 | 557.280.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Farmakmin) | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Dokumen | 1 | 5.266.000 | | | 1 | 10.216.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit | 6 | 528.060.000 | | | 6 | 561.060.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 24 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Keluarga | | 8.640.000 | | | | 8.640.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Grhasia) | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen | 12 | 4.280.305.700 | | | 5 | 3.327.244.850 |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Respira) | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen | 2 | 1.452.500.000 | | | 2 | 1.643.856.900 |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | 5.700.000 | | | | 6.300.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dokumen | 3 | 5.700.000 | | | | 6.300.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 63.530.000 | | | | 67.383.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Unit | 38 | 38.530.000 | | | | 42.383.000 |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | Unit | 30 | 25.000.000 | | | | 25.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---------|-----|---------------|--|--|----|-------------|
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 2.732.621.560 | | | | 970.873.030 |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | | | 30.000.000 | | | | 30.000.000 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 02 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi | Orang | 5 | 30.000.000 | | | | 30.000.000 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 2.702.621.560 | | | | 940.873.030 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dokumen | 1 | 200.000.000 | | | | 250.000.000 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes) | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 30 | 20.000.000 | | | | 20.000.000 |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bapelkes) | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 600 | 2.482.621.560 | | | | 670.873.030 |
| 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | 29.224.000 | | | | 32.906.000 |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cadang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | | | | 18.577.000 | | | | 21.859.000 |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan | Sarana | 34 | 18.577.000 | | | 37 | 21.859.000 |
| 1 | 02 | 04 | 1.02 | | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Farmakmin) | | | | 10.647.000 | | | | 11.047.000 |
| 1 | 02 | 04 | 1.02 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Sarana | 35 | 10.647.000 | | | 36 | 11.047.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|------|----|-------------|--|--|----|-------------|
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 08 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | 612.220.000 | | | | 673.442.000 |
| 2 | 22 | 08 | 1.08 | | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | | | | 612.220.000 | | | | 673.442.000 |
| 2 | 22 | 08 | 1.08 | 04 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional | Unit | 12 | 612.220.000 | | | 12 | 673.442.000 |

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan 2023

Nama SKPD: Dinas Kesehatan

Pagu : Rp.

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | |
|------|---|--|-----------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 | 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | |
| 1 | 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | 150.052.916.645 | |
| 1 | 02 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 45.125.000 | |
| 1 | 02 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 | 35.125.000 | |
| 1 | 02 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 2 | 2.500.000 | |
| 1 | 02 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 15 | 7.500.000 | |
| 1 | 02 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 90.587.509.929 | |
| 1 | 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinkes) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bln | 260 | 31.905.947.629 | |
| 1 | 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Respira) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bln | 171 | 20.052.412.682 | |
| 1 | 02 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Grhasia) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bln | 321 | 38.384.349.618 | |
| 1 | 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinkes) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 70.200.000 | |
| 1 | 02 01 1.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BLKK) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 36.360.000 | |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--|---------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapel Jamkesos) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 31.860.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Bapelkes) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 24.600.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Respira) | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 75.780.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinkes) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1.662.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Dinkes) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Laporan | 25 | 4.338.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 74.180.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 2.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 14.400.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BLKK) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 18.600.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapel Jamkesos) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 9.060.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 10.320.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Respira) | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 19.800.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 9.500.000 | |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | |
|------|----|----|------|----|---|---|--------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | 02 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | 30 | 9.500.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 2.135.069.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 4.500.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapel Jamkesos) | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 6.967.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bapelkes) | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 29.989.500 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 24.150.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapel Jamkesos) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 142.370.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bapelkes) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 52.696.500 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapel Jamkesos) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 24.350.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (BLKK) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 2 | 951.720.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Bapelkes) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 49.984.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 15.000.000 | |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | |
|------|----|----|------|----|---|---|---------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BLKK) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 170.820.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapel Jamkesos) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 90.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bapelkes) | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 16.256.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 13.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapel Jamkesos) | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 45.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bapelkes) | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 15.500.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 4.600.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bapel Jamkesos) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 2 | 3.600.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 105.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapel Jamkesos) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 151.766.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 2 | 30.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 107.800.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Jamkesos) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 1 | 65.000.000 | |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--|--------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 3.379.445.400 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 1 | 500.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel (Dinkes) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 0 | - | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel (Respira) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 113.219.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel (BLKK) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | 1 | 741.300.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (BLKK) | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan | Unit | 1 | 7.100.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 22 | 328.750.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BLKK) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 21 | 279.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 230.210.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Respira) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 29 | 616.742.400 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapel Jamkesos) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 5 | 40.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinkes) | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 250.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 190.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 5.624.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 25 | 32.500.000 | |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--|---------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | 02 | 01 | 1.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Respira) | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 4 | 45.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 4.868.824.716 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1.500.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 1.500.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 616.820.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BLKK) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 599.163.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapel Jamkesos) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 3 | 104.750.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 328.394.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 950.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BLKK) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 4 | 884.414.276 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapel Jamkesos) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 4 | 409.641.720 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bapelkes) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 972.641.720 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 1.349.061.000 | |

| KODE | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rencana 2022 (Tahun Rencana) | | | | |
|------|----|----|------|----|--|--|--------|----------------|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinkes) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 50 | 233.150.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapel Jamkesos) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 6 | 58.500.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bapelkes) | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 10 | 90.104.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel (Bapelkes) | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 1 | 15.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinkes) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 150.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bapelkes) | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 1 | 56.507.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinkes) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 180.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 100.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bapelkes) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 300.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BLKK) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 90.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapel Jamkesos) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 6.500.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bapelkes) | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 69.300.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|------|----|-----------------|--|
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | 47.604.201.600 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BLKK) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 5.994.201.600 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Bapelkes) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 3.650.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Grhasia) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 20.360.000.000 | |
| 1 | 02 | 01 | 1.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Respira) | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | Unit | 1 | 17.600.000.000 | |
| 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 306.397.556.310 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 204.999.073.610 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 02 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | Unit | 2 | 6.336.275.110 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 03 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | Unit | 1 | 175.000.000.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 41 | 4.783.500.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 12 | Pengadaan Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | Unit | 1 | 1.104.930.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 15 | Pengadaan dan pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan | Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara | Unit | 16 | 4.902.764.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------|-----|----------------|--|
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Dokumen | 6 | 406.604.500 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinkes) | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | Paket | 1 | 2.500.000.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | Paket | 2 | 5.965.000.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.10 | 22 | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan | Paket | 2 | 4.000.000.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 97.554.695.200 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (DRK) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 130 | 788.605.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Farmakmin) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 130 | 250.000.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (BLKK) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | Orang | 130 | 22.000.000.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | Orang | 407 | 300.635.500 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Dokumen | 6 | 484.050.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---------|----|----------------|--|
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Dokumen | 5 | 228.630.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Usia Lanjut | Dokumen | 3 | 24.824.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Dokumen | 8 | 3.625.060.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 2 | 106.850.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Dokumen | 4 | 117.290.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 09 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Dokumen | 3 | 1.204.720.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular) | Dokumen | 10 | 1.549.710.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 2 | 56.726.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Bapel Jamkesos) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Dokumen | 6 | 59.825.929.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Dokumen | 1 | 229.614.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (DRK) | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Dokumen | 4 | 487.280.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Farmakmin) | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Dokumen | 1 | 5.266.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 23 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Unit | 6 | 528.060.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|----------|-----|----------------------|--|
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 24 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Keluarga | | 8.640.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Grhasia) | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen | 12 | 4.280.305.700 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.02 | 22 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Respira) | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Dokumen | 2 | 1.452.500.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | | | | 5.700.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.03 | 01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Dokumen | 3 | 5.700.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 63.530.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | Unit | 38 | 38.530.000 | |
| 1 | 02 | 02 | 1.04 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | Unit | 30 | 25.000.000 | |
| 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | | 2.732.621.560 | |
| 1 | 02 | 03 | 1.01 | | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi | | | | 30.000.000 | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 02 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi | Orang | 5 | 30.000.000 | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | | | | 2.702.621.560 | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 02 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dokumen | 1 | 200.000.000 | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinkes) | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 30 | 20.000.000 | |
| 1 | 02 | 03 | 1.02 | 01 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bapelkes) | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat | Orang | 600 | 2.482.621.560 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--------|----|-------------|--|
| 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | | | | 29.224.000 | |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cadang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) | | | | 18.577.000 | |
| 1 | 02 | 04 | 1.01 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan | Sarana | 34 | 18.577.000 | |
| 1 | 02 | 04 | 1.02 | | Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Farmakmin) | | | | 10.647.000 | |
| 1 | 02 | 04 | 1.02 | 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | Sarana | 35 | 10.647.000 | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | |
| 2 | 22 | 08 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | | | | 612.220.000 | |
| 2 | 22 | 08 | 1.08 | | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | | | | 612.220.000 | |
| 2 | 22 | 08 | 1.08 | 04 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional | Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional | Unit | 12 | 612.220.000 | |

BAB 5 PENUTUP

Dokumen Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023 dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 pada SKPD Dinas Kesehatan DIY. Dokumen Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai penyempurnaan dari dokumen Rencana Kerja 2023 dan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY 2023.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023 diharapkan menjadi acuan penyelarasan dalam penetapan anggaran baik melalui sumber dana APBD DIY maupun dana dekonstrasi serta sumber dana lainnya. Selain itu, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan program/kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian, Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023 disusun melalui berbagai mekanisme proses perencanaan program dan anggaran dengan harapan menjadi dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yogyakarta,

2022


drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes



DINAS KESEHATAN DIY

Jl.Gondosuli No.6 Umbulharjo, Yogyakarta

Telepon 0274 - 563153

e-mail : dinkes@jogjaprov.go.id